

2019

LAPORAN TAHUNAN



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Dengan izin Allah Yang Maha Esa, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Badan Litbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan program kerja tahun 2019 yang terangkum dalam Laporan Tahunan 2019. Kami berharap, Laporan ini dapat menggambarkan kinerja yang dicapai sepanjang 2019 dan menciptakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, khususnya pengembangan SDM TIK serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan produktivitas bangsa menjadi dasar bagi Badan Litbang SDM dalam mengupayakan peningkatan kompetensi SDM Nasional, khususnya angkatan kerja di sektor TIK, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap TIK secara inklusif yang berperan besar dalam peningkatan produktivitas. Dinamika industri TIK dan revolusi industri 4.0 menyebabkan perubahan signifikan pada lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyebabkan banyaknya pekerjaan berangsur menghilang seiring perkembangan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia. Peningkatan kompetensi SDM menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Badan Litbang SDM) pada khususnya.

Pembangunan berbasis riset sangat penting dimana kebijakan berbasis riset memiliki fondasi kontekstual kuat sehingga dapat menjadi acuan arah pembangunan nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha menumbuhkembangkan iklim dan budaya penelitian dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis riset. Hal tersebut menjadi dasar Badan Litbang SDM melaksanakan program kerja 2019 secara terfokus, terarah, terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program kerja 2019. Besar harapan kami agar melalui Laporan Tahunan ini, masyarakat dan stakeholders dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi Badan Litbang SDM untuk memberikan kinerja yang lebih maksimal di tahun mendatang. Atas dukungan, kerja sama dan kinerja seluruh jajaran karyawan Badan Litbang SDM 2019, kami ucapkan terima kasih.

Salam Proaktif!



Kepala Badan Litbang SDM
Basuki Yusuf Iskandar

DAFTAR ISI

iii KATA PENGANTAR

iv DAFTAR ISI

1 PROFIL

3 Tugas dan Fungsi

4 Struktur Organisasi

12 Sumber Daya Manusia

13 Program Kerja

14 Kinerja Keuangan

19 Sarana Prasarana

21 Akreditasi Kelembagaan

23 PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

42 *Policy Brief*

43 Jurnal Ilmiah dan Publikasi

45 Buku Saku Pengembangan SDM
Indonesia 2019

49 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

50 *Digital Talent Scholarship*

55 Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika

56 *Digital Leadership Academy*

62 Penyelenggaraan Beasiswa Pascasarjana

65 Beasiswa Dalam Negeri (Eksternal dan Internal)

TABLE OF CONTENTS

Beasiswa Luar Negeri	68
Peserta Pendidikan Diploma IV, Strata I dan Pendidikan Pelatihan Teknis di STMM Yogyakarta	71
Pengembangan Profesi Bidang Komunikasi dan Informatika	72
Pelatihan dan Sertifikasi Aparatur Bidang Kominfo	76
Pengenalan TIK Bagi Masyarakat (Wanita, Anak-anak, dan Disabilitas)	77
Bimtek Kewirausahaan Sektor Kominfo	78
Peningkatan Kapasitas Pegawai Sesuai dengan Standar Kompetensi	78
KILAS 2019 (81)	
Peluncuran SIMONAS: Platform Rekrutmen Talenta Digital	82
Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Lulusan DTS oleh Industri di Indonesia	84
Diseminasi Informasi Beasiswa S2 Dalam Negeri Kemenkominfo	85
Kerja Sama Badan Litbang SDM	88
<i>Research Idea Gathering</i>	95
<i>Outbound (Outside of Boundaries)</i>	99
KomExpo 2019	100

2019 LAPORAN TAHUNAN



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan Litbang SDM) merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki 2 (dua) peran yaitu sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika dan pelaksana pengembangan SDM bidang komunikasi dan Informatika. Peran tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada seluruh *stakeholders* Badan Litbang SDM baik internal maupun eksternal Kementerian Kominfo terkait dengan perumusan kebijakan/regulasi maupun dalam evaluasi implementasi kebijakan/regulasi di bidang komunikasi dan informatika.

Di lain sisi, Badan Litbang SDM juga menjalankan peran pengembangan SDM yang dilaksanakan melalui pelatihan dan pendidikan dibidang komunikasi dan informatika, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pemanfaatan TIK dalam keseharian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia di bidang komunikasi dan informatika.

Di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak pengaruh dan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi saat ini mendorong pesatnya laju penetrasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Pembangunan infrastruktur memang erat kaitannya dengan jumlah pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan hal tersebut, masyarakat kini mulai menjadikan informasi sebagai suatu komoditi yang berharga. Bagaimanapun juga disadari atau tidak masyarakat informasi yang tengah digadagadag saat ini tidak dapat lepas dari komponen dinamika teknologi informasi.

Teknologi informasi memang telah terbukti berpengaruh terhadap perubahan masyarakat di era ini. Perkembangannya yang pesat saat ini telah mendorong peran strategis informasi sebagai sebuah modal dasar pembangunan. Inilah yang menjadi salah satu kunci bagi pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Suatu upaya untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan tersebut dapat mensejajarkan bangsa Indonesia menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang telah maju, dengan kapabilitas nasional untuk secara setara saling bertukar ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negaranya masing-masing.



Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah yang diberi tugas dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pembangunan komunikasi, informasi dan media massa, termasuk telematika dan penyiaran dalam hal ini mendukung upaya pemerintah terhadap terwujudnya masyarakat informasi berbasis ilmu pengetahuan atau dikenal sebagai *Knowledge Base Society*. Pada pelaksanaannya sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program dan kegiatan terkait dengan satuan kerja yang dinaunginya.

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan unsur penunjang dengan perannya sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, serta sebagai pelaksana pengembangan SDM pada bidang yang sama. Melalui peran inilah, usulan terkait kebijakan maupun regulasi hingga pada evaluasi atas implementasi dari kebijakan tersebut dapat direkomendasikan pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menjalankan peran lainnya, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM juga melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan memfasilitasi proses sertifikasi kompetensi untuk bidang komunikasi dan informatika. Sebagaimana peran yang dimaksud berupaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta pemahaman masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika. Peningkatan literasi, pengetahuan, dan kompetensi masyarakat terkait bidang komunikasi dan informatika bagaimanapun sejalan dengan arah perkembangan masyarakat dalam era informasi saat ini.



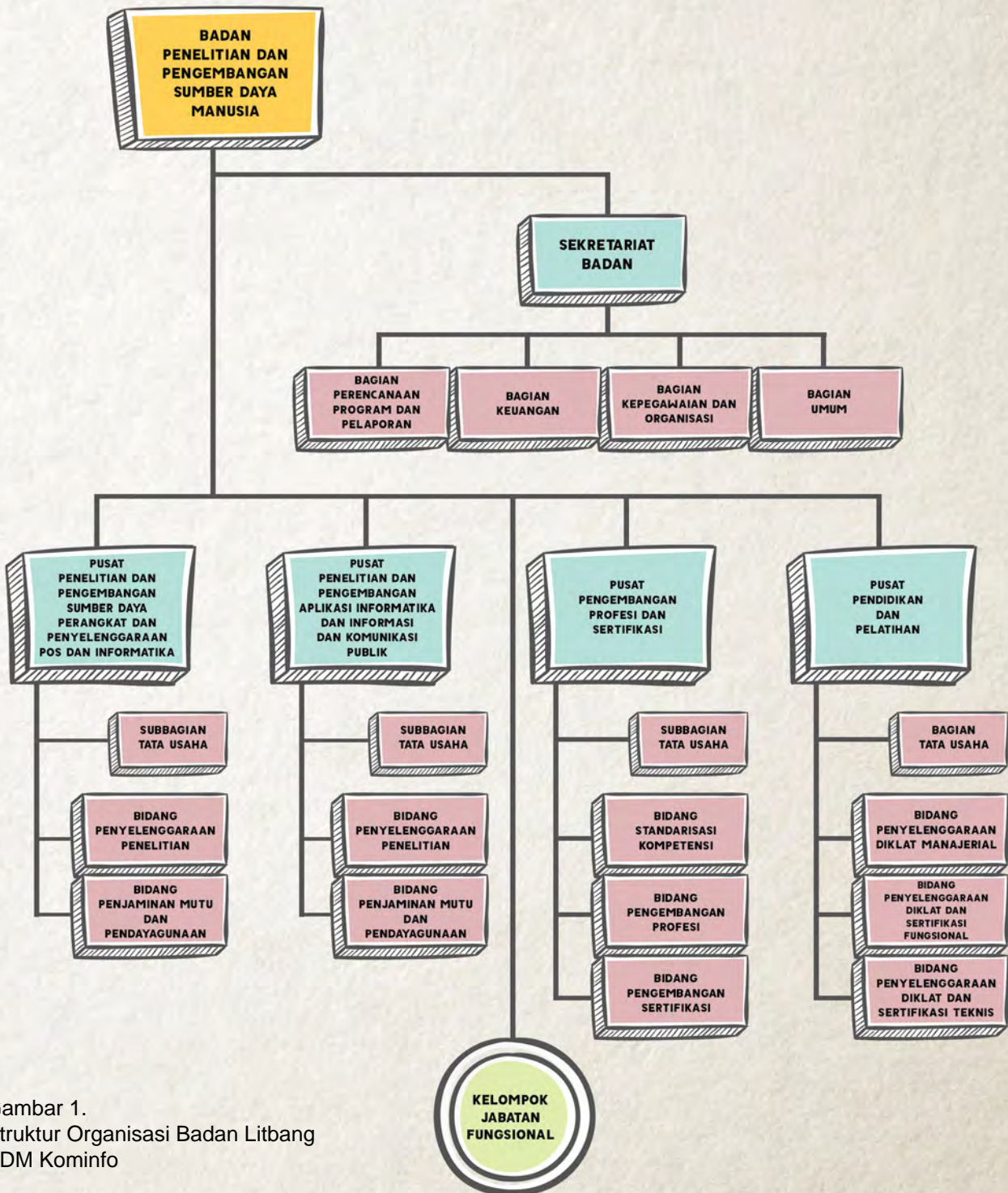
Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Litbang SDM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Litbang SDM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Struktur Organisasi Badan Litbang
SDM Kominfo

Badan Litbang SDM dikepalai oleh seorang Kepala setingkat eselon I dan dibantu lima unit kerja setingkat Eselon II yaitu:

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, pengendalian program dan anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi serta hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia, komunikasi, dan informatika;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta dokumentasi, publikasi dan perpustakaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

4. Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi

Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi, dan pelaporan pengembangan profesi dan sertifikasi bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sistem sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

Selain unit kerja tersebut di atas, Badan Litbang SDM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang ditetapkan melalui beberapa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu:

Unit Pelaksana Teknis Setingkat Eselon II

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta

Dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (STMM).

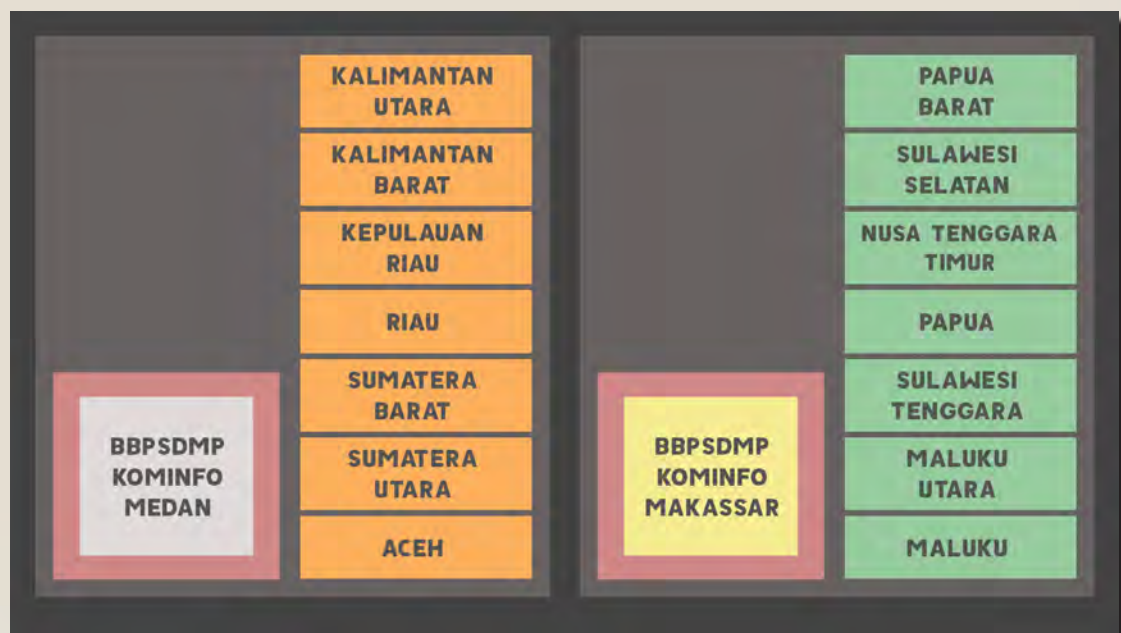
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian STMM, maka dalam melaksanakan Perpres tersebut, Kemenkominfo menerbitkan Permenkominfo nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMM yang dipimpin oleh Ketua STMM (setingkat Eselon II) dan memiliki tugas menyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan infomatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi STMM terdiri dari: Ketua, Pembantu Ketua, Senat, Dewan Penyantun, Satuan Pengawas Intenal, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Administrasi Umum, Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Unit Penunjang Akademik dan Kelompok Jabatan fungsional.

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo)

Dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BBPSDMP dan BPSDMP.

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP kominfo) Medan dan Makassar yang dipimpin oleh Kepala BBPSDMP kominfo, memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan. Susunan organisasi BBPSDMP Kominfo Medan terdiri dari : Bagian Tata Usaha, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP kominfo) terdapat di Medan dan Makassar dengan wilayah kerja sebagai berikut:



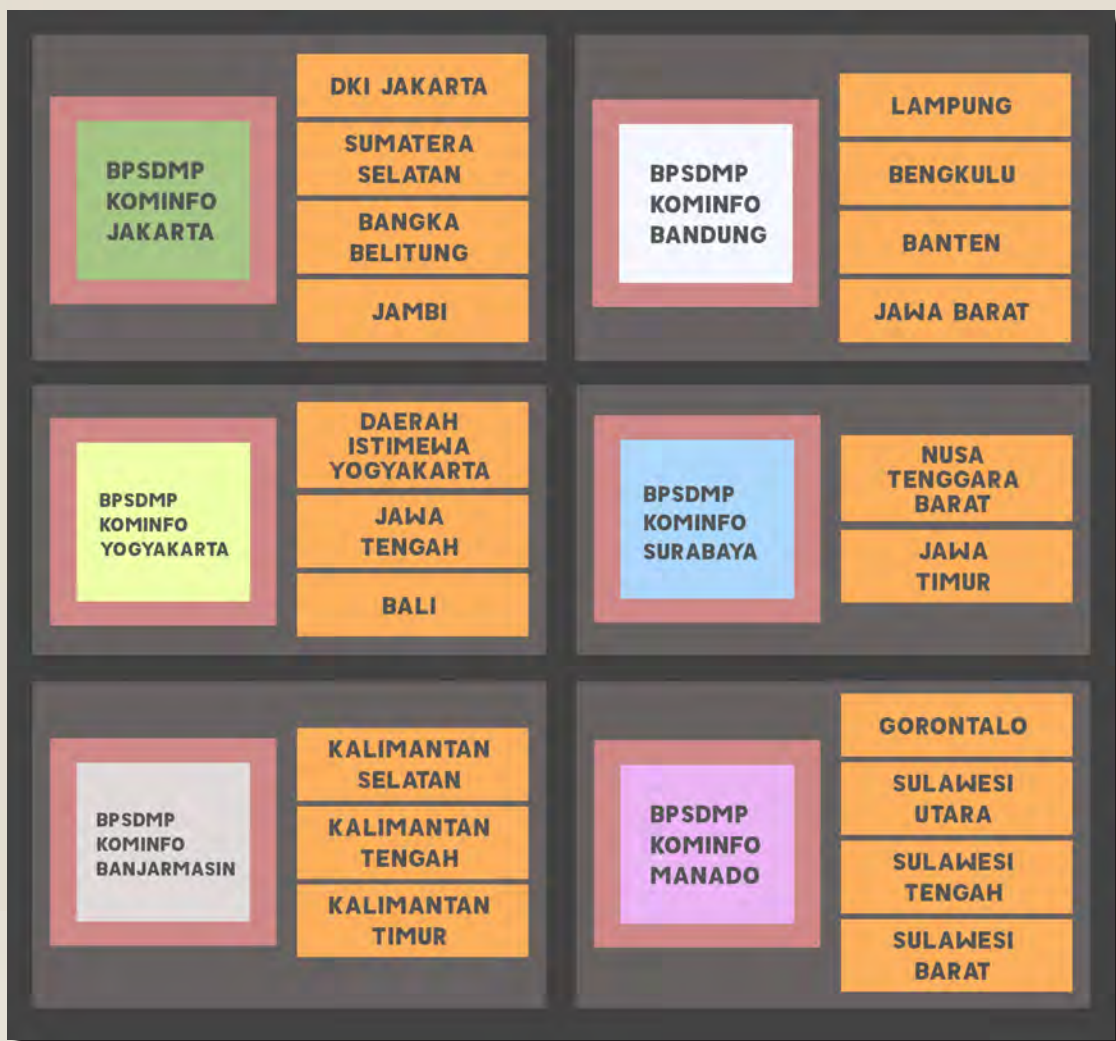
Gambar 2.
Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo Medan dan Makassar

Unit Pelaksana Teknis Setingkat Eselon III

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo)

Dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BBPSDMP dan BPSDMP.

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP kominfo) terdapat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado dengan wilayah kerja sebagai berikut:



Gambar 3.
Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo Jakarta Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Manado

Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang

Dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK).

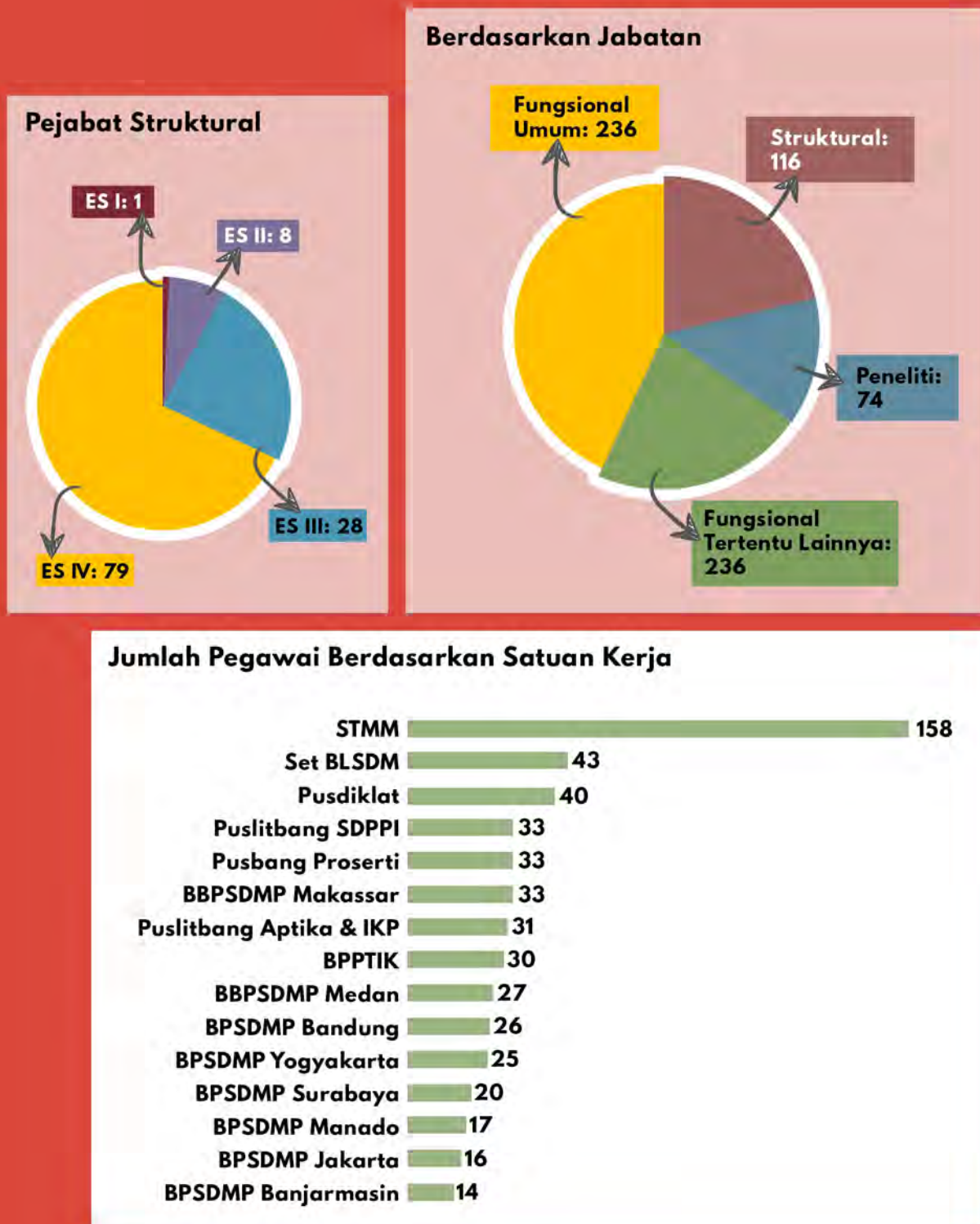
Berdasarkan Permenkominfo nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPPTIK, sebagai salah satu UPT di lingkungan Badan Litbang SDM yang dipimpin oleh Kepala BPPTIK, memiliki tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BPPTIK juga memiliki tugas melaksanakan pelatihan (*vocational training*), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 2668/M.PAN/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009 dan menyelenggarakan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis Bidang TIK. Susunan organisasi BPPTIK terdiri dari: Subbagian Tata Usaha, Sesi Program dan Pelaporan, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Umum, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Litbang SDM didukung oleh 546 pegawai dari 15 (lima belas) Satuan Kerja baik di lingkungan Pusat maupun daerah. Sebanyak 25 (dua puluh lima) pegawai memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2019.

Berikut gambaran komposisi pegawai di lingkungan Badan Litbang SDM:



Gambar 4.
Komposisi Pegawai di Balitbang
SDM Kominfo

Program Kerja

Penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM sepanjang 2019 mengacu kepada Renja Kerja Badan Litbang SDM Tahun 2019. Dalam mencapai Sasaran Program tahun 2019, Badan Litbang SDM melakukan berbagai kegiatan dengan mengukur kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang SDM Tahun 2019.

Perjanjian kinerja Tahun 2019 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji kinerja Badan Litbang SDM yang jelas dan terukur selama tahun 2019 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2019 merupakan implementasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Kementerian.

Tujuan perjanjian kinerja ini adalah untuk menjadi tolak ukur kinerja Badan Litbang SDM sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan serta sanksi atau *punishment*.

Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2019 memiliki 3 (tiga) Sasaran Program dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja dengan target dan realisasi yang dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2019	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	20%	19,05%	95%
		2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI	70%	82%	117%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90%	99%	110%

Tabel 1.
Indikator Kinerja dengan target dan realisasi (bagian pertama)

Tabel bersambung pada halaman berikutnya...

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2019	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)		
2.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan	60%	100%	166%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	≥ 76	90.5	119%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	≥ 67	73.73	110%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018	≤ 1%	0.08	125%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM	a. Thn. Berjalan: 80% b. Thn. Sebelumnya a: 40%	a. Thn. Berjalan: 100% b. Thn. Sebelumnya : 100%	100%
		5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM	≥ 94	93,59	99%

Tabel 2.
Indikator Kinerja dengan target dan realisasi (bagian kedua)

Kinerja Keuangan

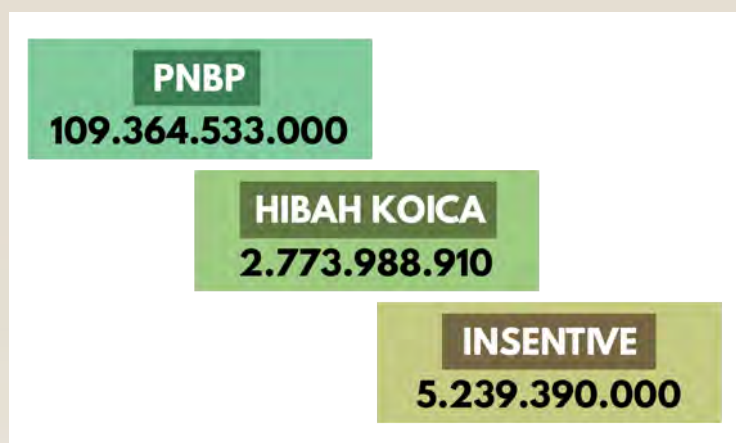
Pada tahun 2019, anggaran Badan Litbang SDM adalah sebesar Rp 385.488.751.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dengan pagu yang jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan performa anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 (95,21%). Realisasi 2019 sebesar Rp 354.473.239.980,- (Tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau 91.95%, turun 3.26% dari tahun sebelumnya. Terdapat anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan Maksimal Pencairan (MP) belum dapat dicairkan dari satker penghasil.

Secara detail kinerja keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 berdasarkan distribusi per satuan kerja/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM dapat dilihat pada table berikut:

No	Satker	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa	%
1	Set. Badan Litbang SDM	74.791.195.000	75.235.274.000	72.547.936.147	2.687.337.853	96,43%
2	Puslitbang Aptika dan IKP	5.120.000.000	5.120.000.000	4.800.143.242	319.856.758	93,75%
3	Puslitbang SDPPPI	4.520.000.000	4.520.000.000	4.456.481.008	63.518.992	98,59%
4	Pusbang Profesi dan Sertifikasi	24.375.492.000	133.740.025.000	113.529.589.744	20.210.435.256	84,89%
5	Pusdiklat	7.949.037.000	8.957.927.000	7.791.825.879	1.166.101.121	86,98%
6	STMM	51.614.792.000	56.468.003.000	54.462.375.305	2.005.627.695	96,45%
7	BBPSDMP Medan	15.817.777.000	15.817.777.000	15.056.554.641	761.222.359	95,19%
8	BBPSDMP Makassar	13.725.587.000	14.471.531.000	14.179.254.558	292.276.442	97,98%
9	BPSDMP Jakarta	7.199.051.000	7.199.051.000	6.797.722.872	401.328.128	94,43%
10	BPSDMP Bandung	7.474.844.000	7.474.844.000	7.382.669.634	92.174.366	98,77%
11	BPSDMP Yogyakarta	9.284.975.000	9.284.975.000	8.419.780.126	865.194.874	90,68%
12	BPSDMP Surabaya	9.706.694.000	9.706.694.000	9.541.674.627	165.019.373	98,30%
13	BPSDMP Banjarmasin	6.456.318.000	6.456.318.000	5.833.138.363	623.179.637	90,35%
14	BPSDMP Manado	7.019.967.000	7.160.813.000	6.963.344.280	197.468.720	97,24%
15	BPPTIK Cikarang	15.525.595.000	21.046.214.000	20.205.612.204	840.601.796	96,01%
16	BPRTIK Ciputat	2.889.305.000	2.829.305.000	2.505.137.350	324.167.650	88,54%
Total		263.470.629.000	385.488.751.000	354.473.239.980	31.015.511.020	91,95%

Tabel 3. Kinerja keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 berdasarkan distribusi per satuan kerja/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM

Dari total pagu di atas, termasuk di dalamnya Badan Litbang SDM mendapatkan tambahan anggaran yang berasal dari:



Gambar 5. Besar dan sumber tambahan anggaran

Dari total realisasi, senilai Rp 109.364.533.000 di antaranya adalah PNPB dari Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI (28,37% dari total pagu Badan Litbang SDM). Berikut rekapitulasi penggunaan sebagian PNPB:

NO	NO SURAT MP	TANGGAL	UNIT KERJA PENGHASIL	NILAI	%
1	SE-28/PB/2019	9 MEI 2019	SDPPI	20.519.233.663	26,14
2	SE-45/PB/2019	28 JUNI 2019	SDPPI	4.999.875.901	6,37
3	SE-68/PB/2019	4 OKTOBER 2019	SDPPI	44.976.059.436	57,30
4	SE-93/PB/2019	9 DESEMBER 2019	SDPPI	8.000.000.000	10,19
Subtotal				78.495.169.000	100,00
5	SE-45/PB/2019	25 JULI 2019	PPI	10.000.000.000	47,62
6	SE-65/PB/2019	30 SEPTEMBER 2019	PPI	1.000.000.000	4,76
7	SE-81/PB/2019	13 NOVEMBER 2019	PPI	10.000.000.000	47,62
Subtotal				21.000.000.000	100,00
TOTAL Pencairan MP				99.495.169.000	
Realisasi/Penggunaan MP				92.003.567.268	Realisasi/Pencairan MP: 92,47%
					Realisasi/ Pagu PNBPNP: 84,13%
Sisa MP				7.491.601.732	

Tabel 4.
Rekapitulasi penggunaan sebagian dana PNBPNP

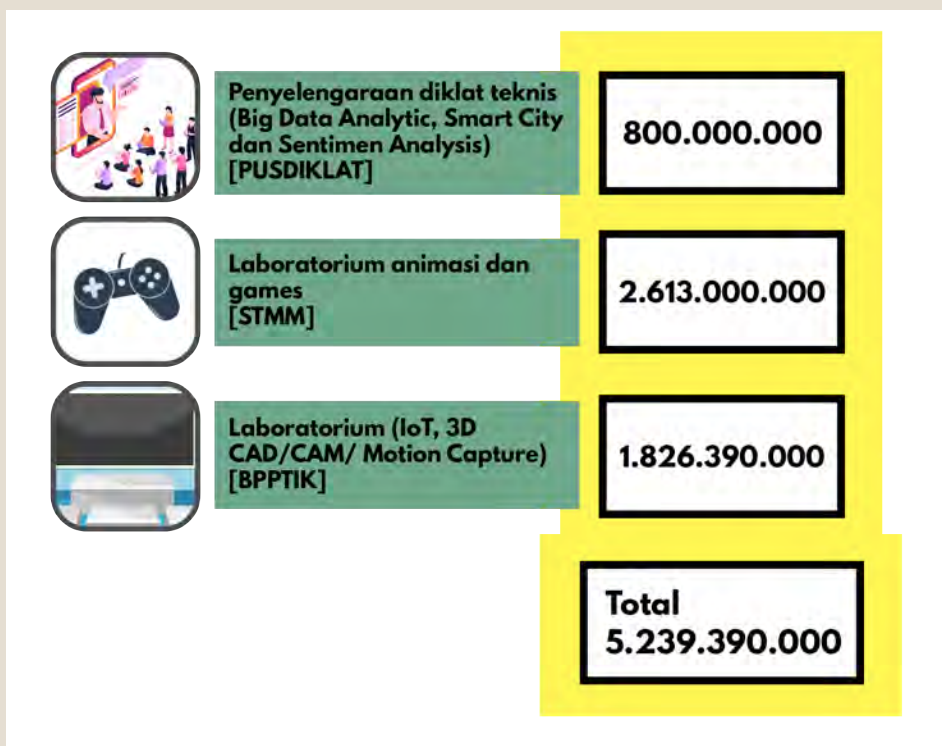
Pada tahun 2019 Badan Litbang SDM cq. BPPTIK juga menerima hibah langsung dalam bentuk uang dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) dengan detail pendapatan dan belanja sebagai berikut:

	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
Pengadaan alat pengolah data (Upgrading PC Unit & Jaringan) Kelas/Laboratorium)	1.473.361.890	1.766.110.990
Pengadaan inventaris asrama peserta (Penggantian mebelair kamar peserta)	560.627.020	445.380.000
Pengadaan kendaraan bermotor operasional BPPTIK	740.000.000	556.925.000
Total	2.773.988.910	2.768.415.990

**HIBAH KOICA (Hibah Langsung)
Gelombang 1: Maret 2019
Gelombang 2: September 2019**

Gambar 6.
Detail pendapatan dan belanja hibah KOICA ke BPPTIK

Selain tambahan PNBP dan hibah, Badan Litbang SDM juga mendapatkan tambahan penerimaan dari insentif yang masuk ke pagu Pusdiklat, STMM, dan BPPTIK Cikarang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 7.
Penggunaan tambahan penerimaan dari insentif

Realisasi penggunaan anggaran Badan Litbang SDM adalah sebesar 91,95%. Kinerja anggaran tersebut belum optimal dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. PNBP tidak terealisasi dengan maksimal disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
 - Alokasi anggaran PNBP senilai Rp 10 M yang berasal dari Ditjen PPI tidak jadi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program DTS karena MP baru dapat dicairkan bulan Desember.
 - Pengiriman MP terakhir dari Ditjen SDPPI senilai Rp 8M tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena baru dapat dicairkan pada bulan Desember.
2. Sebagian besar jadwal pelaksanaan kegiatan - kegiatan DTS mengalami keterlambatan dari jadwal semula dikarenakan anggaran yang bersumber dari PNBP baru dapat dicairkan di bulan Mei.

3. Pembayaran ke mitra perguruan tinggi lebih kecil daripada pagu yang dialokasikan, disebabkan beberapa hal di antaranya:
 - Kuota peserta tidak terpenuhi
 - Terdapat beberapa ruang lingkup pekerjaan yang tidak jadi terlaksana sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran
4. Peningkatan kapasitas dan ruang lingkup pekerjaan program DTS tahun 2019 sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2018. Program ini melibatkan lebih banyak mitra dan skema pelaksanaan yang beragam sehingga banyak komponen pekerjaan baru yang muncul atau bahkan batal dilaksanakan sehingga mempengaruhi besaran alokasi pembiayaan.
5. Peserta yang berhak untuk diikutsertakan dalam program sertifikasi lanjutan (global) tidak terpenuhi kuotanya dikarenakan sebagian peserta tidak mampu memenuhi syarat minimal nilai yang dibutuhkan untuk diikutkan dalam sertifikasi lanjutan (global). Hal ini menyebabkan anggaran yang semula dialokasikan untuk peserta sertifikasi lanjutan tidak dapat terealisasi secara optimal.

Secara umum kinerja dan capaian kinerja Badan Litbang SDM tahun 2019 yang dihasilkan telah diimplementasikan secara maksimal dan dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian masih tetap diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada T-1 atau selambat-lambatnya di awal tahun berjalan;
2. Mengantisipasi pencairan dana program/kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN unit kerja Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI dengan kemungkinan baru akan dapat dicairkan pada pertengahan tahun; dan
3. Mengantisipasi skema baru program DTS dengan menyesuaikan dengan kondisi anggaran existing.



Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung dengan sarana dan prasarana yang masuk ke dalam inventaris Barang Milik Negara. Saldo Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.795.778.468.924,- (Enam ratus enam puluh miliar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

KATEGORI BMN	SALDO		SALDO	
	PER 1 JANUARI 2019		PER 31 DESEMBER 2019	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai
Tanah	79.324 m2	1.235.511.103.000	79.524 m2	1.273.886.522.000
Peralatan dan Mesin	31.825	252.828.750.563	35.146	274.942.736.458
Gedung dan Bangunan	68	161.852.938.200	71	220.649.186.393
Jalan dan Jembatan	574	86.829.000	5.790	775.135.000
Irigasi	6	319.280.000	6	444.669.000
Jaringan	16	2.847.633.746	17	3.604.094.246
Aset Tetap Lainnya	41.207	13.039.643.557	40.413	13.240.504.837
Software	1.242	5.090.303.421	793	4.094.390.032
Lisensi	7	40.279.800	7	40.279.800
Aset Tak Berwujud Lainnya	1	496.894.301	1	496.894.301
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	293	1.058.345.058	613	3.604.056.857
TOTAL		1.673.172.000.646		1.795.778.468.924

Tabel 5.
Saldo Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM per 31 Desember 2019



Badan Litbang SDM sebagai *executing agency* atas hibah “*Information Technology Management Support For ICT Training And Development Center*” dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) Korea Selatan sebesar USD \$345.204 yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas dan utilitas BPPTIK melalui peningkatan perangkat pelatihan TIK, pengadaan kendaraan bermotor, renovasi gedung/bangunan, dan pengembangan kurikulum bidang TIK dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan pengolah data (PC unit) laboratorium;
2. Pengadaan inventaris asrama;
3. Renovasi gedung/bangunan;
4. Pengadaan kendaraan bermotor;
5. Pengembangan kurikulum bidang TIK.

Dari laporan hibah triwulan IV TA 2019, tercatat bahwa pagu DIPA hibah tahun berjalan adalah Rp 2.773.988.910 dengan realisasi belanja pada Triwulan III sebesar Rp 2.211.490.990 dan Triwulan IV senilai Rp 556.925.000 sehingga total Belanja adalah sebesar Rp 2.768.415.990.



“Pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun hal ini juga akan menunjukkan martabat dan juga kualitas sebuah bangsa yang baik.”

Sri Mulyani Indrawati

Akreditasi Kelembagaan

Akreditasi adalah suatu pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi. KBBI mengartikan akreditasi sebagai pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.

Mendapat akreditasi dari Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) merupakan pengakuan formal atas kemampuan melaksanakan litbang sesuai tugas dan fungsi, visi dan misi, mutu keluaran hasil litbang, efisiensi dan kinerja. Akreditasi KNAPP adalah akreditasi yang khusus diberikan kepada lembaga litbang. Tujuan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan adalah sebagai evaluasi instrument pranata litbang, koordinasi kegiatan litbang, instrumen pembinaan pranata litbang, instrumen pengakuan pranata litbang yang kompeten dibidangnya, dan instrumen memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kompetensi pranata litbang. Satker dan UPT di lingkungan Badan Litbang SDM berusaha semaksimal mungkin memenuhi persyaratan akreditasi kelembagaan yang ditetapkan KNAPPP untuk mendapat akreditasi.

Selain akreditasi pranata litbang, akreditasi lembaga diklat juga perlu mendapatkan pengakuan dari instansi pembina seperti Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang sebagai satker yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mendapatkan akreditasi dari LAN, dan STMM Yogyakarta mendapatkan akreditasi dari BAN-PT.

Berikut rincian akreditasi kelembagaan satker/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM:

No	Satuan Kerja	Akreditasi
1	Pustlitbang APTIKA IKP	Terakreditasi KNAPPP mulai 26 September 2019 s.d 25 September 2022 SK Ketua KNAPPP Nomor: 18/Kp/KA-KNAPPP/IX/2019, dengan ruang lingkup 14.04 (TIK: Teknik Sistem Informasi) dan 34.04 (Ilmu Komunikasi: Komunikasi Media)
2	Pustlitbang SDPPPI	Terakreditasi KNAPPP (memenuhi Pedoman KNAPPP 02:2017) SK Ketua KNAPPP No. 17/Kp/KA-KNAPPP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018
3	STMM Yogyakarta	Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 27 Desember 2018 s.d 27 Desember 2021 Prodi : - Manajemen Pemberitaan : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 30 Mei 2015 s.d 30 Mei 2020 - Manajemen Produksi Siaran : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 6 April 2015 s.d 6 April 2020 - Manajemen Studio Produksi Siaran : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 22 Juni 2015 s.d 22 Juni 2020 - Animasi : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 24 Juli 2015 s.d 24 Juli 2020 - Teknologi Permainan : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 22 Juni 2015 s.d 24 Juni 2020 - Manajemen Informasi Komunikasi : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 22 Agustus 2017 s.d 22 Agustus 2022
4	Pusdiklat	Terakreditasi LAN : - Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV dan Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori "C" dari 7 November 2019 s.d November 2021 - Akreditasi Pelatihan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika dengan status "Pendelegasian Wewenang" dari 10 Juli 2019 s.d Juli 2024

Tabel 6.
Akreditasi kelembagaan satker/
UPT di Balitbang SDM Kominfo
(bagian pertama)

Tabel bersambung pada halaman berikutnya...

5	BPPTIK	Terkreditasi A oleh LAN, berlaku selama 5 tahun dr TA 2016-2020 Pendelegasian Kewenangan Pengakreditasi Diklat Teknis TIK: Pengakreditasi: Balitbang SDM Masa akreditasi: 2 tahun (C) 3 tahun (B) 5 tahun (A)
6	BBPSDMP Medan	Terakreditasi KNAPPP mulai 29 Nov 2018 s.d 28 Nov 2021
7	BBPSDMP Makassar	Terakreditasi KNAPPP mulai 29 Nov 2018 s.d 28 Nov 2021
8	BPSDMP Jakarta	Terakreditasi KNAPPP
9	BPSDMP Bandung	Terakreditasi KNAPPP mulai 22 Agustus 2019 s.d 21 Agustus 2022
10	BPSDMP Yogyakarta	Terakreditasi KNAPPP mulai 12 April 2018 s.d 11 April 2021 Terakreditasi ISO 9001:2015
11	BPSDMP Surabaya	Terakreditasi KNAPPP mjlulai 14 Maret 2019 s.d 13 Maret 2022
12	BPSDMP Manado	Terakreditasi KNAPPP mulai 16 Mei 2019 s.d 15 Mei 2022

Tabel 7.
Akreditasi kelembagaan satker/UPT di Balitbang SDM Kominfo
(bagian kedua)

PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kebijakan pemerintah yang berdasarkan hasil riset dan kajian adalah penting dimana kebijakan tersebut memiliki pondasi kontekstual yang kokoh untuk menjawab tantangan kekinian dan masa depan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya menumbuhkembangkan iklim penelitian dan pengembangan di bidang kominfo dan menghasilkan kebijakan/regulasi yang berlandaskan pada hasil kajian/riset. Oleh karena itu, tidak hanya melakukan penelitian *long-term* dan *short-term*, kami juga berusaha *catch up* dengan isu terkini dengan menghadirkan *policy brief* yang diharapkan dapat menjadi pijakan pengambilan keputusan/kebijakan.

Berikut adalah daftar judul penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang SDM pada tahun 2019.

Puslitbang SDPPPI

1. Studi Penyesuaian Tarif Layanan Pos Universal;
2. Analisis Kebutuhan Regulasi Pembangunan *Small Cell 5G* di Indonesia;
3. Analisis Perencanaan SDM PT Pos Indonesia;
4. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap *Digital Terrestrial Television* (DTT);
5. Kajian Sinergisitas Penyelenggaraan Layanan OTT dengan Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia.

Puslitbang APTIKA IKP

1. Proyeksi Kebutuhan SDM Bidang TIK di Indonesia (2019-2030);
2. Perkembangan dan Strategi Arah Pengembangan Ekonomi Digital;
3. Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia;
4. Pengembangan Konsep GPR di Era Revolusi Industri 4.0;
5. Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat;
6. Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik.

BBPSDMP Kominfo Medan

1. Penelitian Rencana Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Penelitian Kesiapan UMKM Dalam Menghadapi *E-Commerce* di Sumatera Utara.

BBPSDMP Koinfo Makassar

1. Survey Indikator TIK;
2. Analisis Performansi Layanan Telekomunikasi Berdasarkan Persepsi Konsumen;
3. Studi Eksistensi Media Tradisional di Era Digitalisasi;
4. Strategi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi Pariwisata Kabupaten Bulukumba;
5. Strategi Komunikasi Pemda Kabupaten Tana Toraja Dalam Promosi Pariwisata.

BPSDMP Koinfo Bandung

1. Kompetensi Digital Pelaku UMKM Kabupaten Bandung Barat;
2. Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat;
3. Analisis Strategis Kabupaten Subang Menuju *Smart City*;
4. Kesiapan Desa Di Kabupaten Bandung Barat dalam Program Desa Digital.

BBPSDMP Koinfo Jakarta

1. Survei Penggunaan TIK serta Implikasinya Terhadap aspek Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Tahun 2019;
2. Studi Kesiapan Pengembangan *Smart Province* di Provinsi Sumatera Selatan.

BPSDMP Kominfo Yogyakarta

1. Kesiapan Pengelola Data Pemerintah untuk Mendukung RUU Perlindungan Data Pribadi;
2. Survei Penggunaan TIK Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat;
3. Usulan *Framework* Kota Cerdas Berkelanjutan yang Terintegrasi.

BPSDMP Kominfo Surabaya

1. Kesiapan SDM Menuju Revolusi Industri 4.0 (Kesiapan Pemerintah Daerah Menumbuhkan *StartUp* Lokal melalui Industri Kreatif);
2. Survei Indikator TIK serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat.

BPSDMP Kominfo Banjarmasin

Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Tahun 2019.

BPSDMP Kominfo Manado

Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Tahun 2019.

Untuk memastikan hasil Penelitian tepat sasaran, bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti oleh *stakeholders*, Badan Litbang SDM telah mendapatkan masukan judul penelitian dari satker *user* yang akan menggunakan hasil Penelitian agar hasil penelitian tepat guna dan tepat sasaran serta dapat langsung digunakan menjadi landasan kebijakan. Dengan target 60% Penelitian bermanfaat untuk menjadi kebijakan, maka minimal 7 (tujuh) Penelitian harus dinilai Bermanfaat oleh *stakeholders*.

Setelah Penelitian selesai di penghujung tahun 2019, Laporan Penelitian didarkan ke *stakeholders* untuk menilai kebermanfaatannya hasil penelitian apakah dapat menjadi acuan pengambilan keputusan/kebijakan. Berikut merupakan rekap kuesioner *feedback* Penelitian:

No	Judul	Stakeholder	Bermanfaat (√) Tidak (x)
1.	Studi Penyesuaian Tarif Layanan Pos Universal	Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media I, Kementerian BUMN	√
2.	Analisis Kebutuhan Regulasi Pembangunan Small Cell 5G di Indonesia	Dit Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI Kemenkominfo	√
3.	Analisis Perencanaan SDM PT Pos Indonesia	Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media I, Kementerian BUMN	√
4.	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Digital Terrestrial Television (DTT)	Dit. Penyiaran, Ditjen PPI Kemenkominfo	√
5.	Kajian Sinergisitas Penyelenggaraan Layanan OTT Dengan Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) • Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 	√
6.	Proyeksi Kebutuhan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia (2019-2030)	BPPTIK Cikarang Kemenkominfo	√
7.	Perkembangan dan Strategi Arah Pengembangan Ekonomi Digital	Dit. Ekonomi Digital, Ditjen Aptika Kemenkominfo	√
8.	Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Dit. Tata Kelola Aplikasi Informatika, Ditjen Aptika Kemenkominfo	√
9.	Pengembangan Konsep GPR di Era Revolusi Industri 4.0	Sesditjen IKP, Ditjen IKP Kemenkominfo	√
10.	Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat	Pusat Kelembagaan Internasional, Setjen Kemenkominfo	√
11.	Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Dit. Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kemenkominfo	√

Tabel 8.
Rekapitulasi kuesioner *feedback* Penelitian

Dari rekap di atas, dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) Penelitian dinilai bermanfaat oleh *stakeholders* dari total 11 (sebelas) Penelitian utama sehingga capaian kebermanfaatan hasil Penelitian tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Berikut simpulan dari *Executive Summary* Penelitian dimaksud:

1. Studi Penyesuaian Tarif Layanan Pos Universal (LPU)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri dan Luar Negeri merupakan ketentuan tarif LPU yang diberlakukan sebelum Permen Kominfo No. 29 Tahun 2013 yang dalam pembahasannya sejak tahun 2009, sehingga sangat dimungkinkan perubahan lingkungan eksternal saat ini sudah mengalami perubahan antara lain perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi makro. Karenanya dibutuhkan kajian strategis untuk menyesuaikan tarif LPU dengan kondisi saat ini untuk mengurangi beban kerugian PT. Pos Indonesia akibat penugasan LPU. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah tersusunnya skenario penyesuaian Tarif Layanan Pos Universal dengan kondisi saat ini, pada era liberalisasi sektor pos. Sasaran studi penyesuaian tarif LPU yang diatur dalam Permen Kominfo Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Pos Universal.

Kesimpulan studi ini membagi scenario menjadi 2, yakni: skenario kenaikan tarif surat DN dengan pertimbangan proyeksi produksi surat akan terus menurun; dan Skenario kenaikan tarif paket DN dengan pertimbangan proyeksi produksi paket mengalami tren yang meningkat.

Skenario kenaikan tarif surat DN dengan pertimbangan proyeksi produksi surat akan terus menurun: 1. Kenaikan tarif 103% berdasarkan pengaruh faktor eksternal diproyeksikan dapat memberikan keuntungan; 2. Kenaikan tarif 90,5% berdasarkan Harga Pokok Produksi (HPP) dan mencapai BEP sehingga tidak ada selisih tarif antara biaya layanan dan tarif LPU surat dalam negeri; 3. Kenaikan tarif sebesar 131% berdasarkan konversi tabel *point to point* ke zona AKDP dan AKAP surat diproyeksikan akan memberikan keuntungan rata-rata Rp. 5 Miliar / tahun sampai tahun 2023. Skenario kenaikan tarif paket DN dengan pertimbangan proyeksi produksi paket mengalami tren yang meningkat. 1. Kenaikan tarif 103% berdasarkan pengaruh faktor eksternal akan mengurangi kerugian selisih tarif hingga mencapai hampir 60% sampai dengan 2023; 2. Kenaikan tarif 200% berdasarkan Harga Pokok Produksi (HPP) dan mencapai BEP sehingga tidak ada selisih tarif antara biaya layanan dan tarif LPU paket dalam negeri; 3. Kenaikan tarif sebesar 227,5% berdasarkan tabel tarif *point to point* paket diproyeksikan akan memberikan keuntungan rata-rata 58 miliar rupiah/tahun sampai tahun 2023 dengan perbedaan tarif paket LPU dengan tarif komersial terendah hanya sekitar 20%.



Dari kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan bagi PT. Pos Indonesia adalah:

1. Sesuai amanat PP 15 tahun 2013 pasal 34 yang menyatakan bahwa penetapan tarif LPU perlu memperhitungkan daya beli masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan peraturan kenaikan tarif perlu memperhatikan faktor tersebut; dan
2. Perlu memperhitungkan dampak dan mekanisme perhitungan tarif LPU internasional sehubungan dengan adanya kongres luar biasa ke-3 *Universal Postal Union* pada September 2019.

2. Analisis Kebutuhan Regulasi Pembangunan Small Cell 5G di Indonesia

Teknologi telekomunikasi seluler merupakan teknologi yang berkembang paling cepat dibandingkan teknologi-teknologi lainnya. Sekitar 10 tahun sekali generasi baru teknologi seluler diperkenalkan, dan tiba saatnya kini pemerintah Indonesia mempersiapkan adopsi teknologi generasi ke-5 (5G). Pembangunan infrastruktur 5G merupakan salah satu bagian dari pengarusutamaan (*mainstreaming*) transformasi digital yang tercantum pada rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. *Small cell* merupakan salah satu teknologi pendukung yang penting untuk dapat memenuhi target-target teknologi 5G. Ukurannya yang kompak membuatnya fleksibel untuk ditempatkan baik pada tiang-tiang telekomunikasi maupun pada tiang-tiang lampu jalan, papan reklame, dinding bangunan, dll. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan skalabilitas jaringan. Namun dalam prakteknya regulasi saat ini belum sepenuhnya mengakomodir kehadiran *small cell*. Oleh sebab itu, studi ini berusaha untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi adopsi teknologi *small cell*.

Untuk mengakomodir masifnya implementasi *small cell*, diusulkan beberapa rekomendasi berikut:

1. Memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia (seperti tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu, dinding-dinding bangunan, dll) sebagai sarana untuk memasang perangkat *small cell*. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi proses perizinan dan besaran biaya retribusi. Namun untuk itu diperlukan sebuah petunjuk teknis pemasangan *small cell* pada infrastruktur-infrastruktur tersebut untuk meminimalisasi resiko kesehatan dan menekan polusi visual yang ditimbulkan oleh masifnya pemasangan *small cell*. Pada tingkat daerah aturan ini diperlukan sebagai dasar pemanfaatan infrastruktur-infrastruktur tersebut;



2. Infrastruktur tiang telekomunikasi (ketinggian tidak lebih dari 11-12 m) selayaknya tidak dikategorikan sebagai bangunan beresiko tinggi. Dengan demikian perlu peninjauan kembali terhadap persyaratan teknis dan administratif perizinan pembangunan infrastruktur tersebut. Persyaratan yang kurang relevan, sebagai contoh izin atau sosialisasi warga, dapat dihilangkan. Selain itu, besaran retribusi perlu disesuaikan dengan nilai yang lebih *acceptable* dan IMB seharusnya berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan struktur;
3. Dapat dipertimbangkan model bisnis *small cell as a service* (SCaaS) dengan neutral host dimana jaringan disediakan oleh pihak ketiga dan operator-operator berperan sebagai penyewa. Selain untuk menekan biaya-biaya, hal ini juga perlu untuk meminimalisasi penumpukkan perangkat *small cell* dari beberapa operator yang berpotensi meningkatkan polusi visual. SCaaS juga diharapkan dapat menekan defisit neraca perdagangan yang ditimbulkan oleh kebutuhan perangkat *small cell* dan perangkat pengguna secara massif;
4. Mendorong operator dan vendor untuk menerapkan teknologi virtualisasi pada jaringannya, khususnya pada jaringan-jaringan baru. Selain meingkatkan skalabilitas dan fleksibilitas, hal ini juga diharapkan dapat menekan biaya-biaya jaringan dan lebih cepat di dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat;
5. Pemerintah daerah perlu membuat terobosan-terobosan baru di dalam proses perizinan infrastruktur telekomunikasi, sebagai contoh dengan menerapkan perizinan infrastruktur *small cell* secara kolektif/kluster (tidak lagi satu-satu) disesuaikan dengan jumlah dan lokasi pemasangan perangkat *small cell*;
6. Perlu percepatan pelaksanaan perizinan secara elektronik secara penuh pada pemerintah daerah untuk mendorong transparansi, dan percepatan pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan;
7. Perlu adanya asistensi terhadap pemerintah daerah di dalam menyusun regulasi terkait infrastruktur telekomunikasi dan menjadikan pemerintah daerah tersebut sebagai percontohan bagi pemerintah daerah lainnya. Hal ini penting mengingat besarnya efek *copy paste* regulasi di antara pemerintah-pemerintah daerah;
8. Perlu adanya harmonisasi peraturan di antara ekosistem regulator infrastruktur telekomunikasi untuk menjamin tidak terjadinya tumpang tindih dan pertentangan peraturan.

3. Analisis Perencanaan SDM PT Pos Indo

PT. Pos Indonesia (Persero) perlu melakukan evaluasi terhadap produk dan layanan bidang kurir dan logistik, jasa keuangan, dan benda pos, terkait dengan kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia dalam menghadapi persaingan saat ini. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia PT. Pos Indonesia melalui beberapa skenario berdasarkan pemetaan produk dan layanan perposan yang ideal sesuai dengan kebutuhan pasar.

Rekomendasi kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia PT. Pos Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi produk dan pasar, PT. Pos Indonesia dapat mengoptimalkan produk-produk yang kurang pesaingnya (*blue ocean*). Selain itu, PT. Pos Indonesia juga dapat terjun pada pasar yang sudah dibentuk oleh perusahaan perposan lainnya;
2. Struktur organisasi PT. Pos Indonesia dapat lebih dioptimalkan lagi untuk memperoleh efisiensi baik dari sisi tata kelola, dan PT Pos perlu meminimalkan rentang kendali dengan cara mereduksi bagian-bagian atau divisi-divisi yang berpotensi tumpang tindih dan mengurangi leveling jabatan;
3. PT. Pos Indonesia dapat menggunakan strategi *zero-growth* untuk lebih mengefisienkan beban pegawai. Strategi ini dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai secara natural, atau berkurang secara bertahap sampai dengan 5 tahun kedepan. Strategi ini diambil agar tidak terjadi guncangan seperti halnya dengan melakukan opsi merumahkan pegawai;
4. Untuk menyederhanakan proses manajemen SDM, PT. Pos Indonesia dapat menggunakan strategi kemitraan dengan beberapa keuntungan seperti mengurangi biaya *fixed cost* seperti biaya-biaya THR, jaminan perlindungan seperti upah, lembur, tunjangan, waktu istirahat, jam kerja maksimum, jaminan sosial/asuransi, dan sakit. Selain itu juga dapat mengurangi kerumitan proses manajemen SDM seperti keterlibatan Serikat Pegawai.



4. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Digital Terrestrial Television (DTT)

Digital Terrestrial Television (DTT) atau Televisi Terrestrial Digital merupakan teknologi yang menghemat penggunaan frekuensi radio oleh lembaga penyiaran dengan kualitas gambar semakin tajam. Beberapa keuntungan televisi terrestrial digital dibandingkan dengan televisi analog diantaranya gambar yang lebih jelas (tidak berbayang/*noise*), resolusi lebih besar, layanan ramah penonton (ada teks terjemahan/subtitle), data penyiaran lebih lengkap, dan terdapat panduan program elektronik.

Sehubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk menetapkan *Analog Switch Off* (ASO) di tahun 2020, namun kondisi saat ini belum ada kepastian hukum atau regulasi yang mendukung rencana program tersebut. Disamping itu, data jumlah kepemilikan perangkat DTT di masyarakat belum tersedia. Studi ini memberikan kajian mengenai tingkat pemahaman masyarakat dan faktor yang mendorong adopsi DTT di tengah keterlambatan migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di wilayah uji coba siaran Tahap IV.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi oleh pemerintah dapat dilanjutkan dan intensitasnya dapat ditingkatkan dengan lebih memfokuskan kepada sosialisasi tatap muka, melalui TV/radio, dan media sosial. Sosialisasi melalui media tatap muka lebih dipilih masyarakat karena adanya kemungkinan interaksi antara masyarakat dan penyelenggara sosialisasi. Cakupan sosialisasi tatap muka sebaiknya langsung ke masyarakat (minimal di tingkat kelurahan), tidak hanya di kampus/kantor Pemda;
2. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan sektor ritel barang-barang elektronik sebagai agen sosialisasi TV digital kepada masyarakat;
3. Perlu peningkatan jumlah kanal siaran DTT agar masyarakat lebih tertarik untuk migrasi ke siaran DTT. Disamping itu, konten siaran DTT juga perlu diperkaya dengan menitikberatkan kepada konten-konten yang paling banyak diminati masyarakat, seperti berita, hiburan, dan olah raga;
4. Dilihat dari perspektif pengguna, percepatan ASO dapat dilakukan dengan fasilitasi pemerintah dan industri dengan menyediakan STB dengan harga terjangkau. Namun yang tidak kalah penting adalah ketika ASO dilakukan, semua wilayah yang selama ini tercakup oleh siaran TV analog telah terlayani dengan siaran TV *digital terrestrial*;



5. Dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 5.4 juta (BPS, 2019), dimana 15,5 juta berada di pedesaan dan 9,9 juta rumah tangga miskin berada di perkotaan. Jika diasumsikan di perkotaan diberikan STB bersubsidi (masyarakat membayar hanya 100 Ribu, hanya STB) dan di pedesaan diberikan STB dan antenna gratis, total anggaran yang harus disediakan sebesar 1,48 T. Bantuan STB dan antenna gratis (baik dari pemerintah maupun pihak swasta) harus tepat sasaran dengan melibatkan Pemda dan aparat desa terkait.

5. Kajian Sinergisitas Penyelenggaraan Layanan OTT Dengan Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia

Perilaku digital di berbagai belahan dunia mengarah pada konvergensi di dalam perangkat mobile, fenomena tersebut ditandai dengan semakin menguatnya penggunaan aplikasi messaging dan media sosial. Seiring meningkatnya akses layanan data, keuntungan finansial di bidang yang relatif baru ini ternyata lebih banyak dinikmati oleh perusahaan OTT dibandingkan dengan pihak penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi dituntut untuk mengembangkan infrastruktur dengan modal investasi yang cukup besar. Di sisi lain, OTT bebas beroperasi kapan saja dan dimana saja, dengan perolehan keuntungan yang terus meningkat, tanpa perlu membayar kepada operator atau perusahaan telekomunikasi lokal. Pemerintah memiliki peran mengatur penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika melalui penetapan regulasi dan kebijakan untuk melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Oleh sebab itu studi ini berusaha mengkaji lebih lanjut mengenai kondisi keberadaan layanan OTT di Indonesia saat ini beserta dampaknya terhadap industri atau penyelenggara telekomunikasi di Indonesia agar dapat menjadi landasan dan referensi bagi penetapan regulasi dan kebijakan dimaksud.

Dari hasil penelitian, dapatlah disimpulkan bahwa pertumbuhan layanan OTT sangat mempengaruhi pendapatan operator telekomunikasi khususnya pada layanan voice & SMS. Terjadi penurunan CAGR terbesar pada tahun 2018 sebesar 28%. Tren menunjukkan bahwa layanan suara terus menurun, karena digantikan oleh. Pada tahun 2018, penggunaan layanan suara operator turun menjadi sekitar 60 menit/bulan yang sebelumnya menghabiskan 107 menit/bulan pada tahun 2013 karena migrasi layanan OTT seperti WhatsApp dan Line. Pendapatan dari layanan data belum menggantikan meskipun trafik layanan data sudah menunjukkan peningkatan. Dalam menghadapi pertumbuhan layanan OTT ini beberapa negara menerapkan kebijakan yang mendukung netralitas jaringan, yang mewajibkan izin penyelenggaraan layanan OTT dan yang mendorong kerjasama antar operator dan OTT. Indonesia sendiri masih belum ada regulasi yang kuat dalam mengatur layanan OTT ini.



Dari hasil kajian di atas, Peneliti merekomendasikan bahwa diperlukan kebijakan terkait penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, yang mengatur:

1. Persaingan usaha yang sehat antara penyedia layanan OTT dengan operator;
2. Kewajiban kerjasama OTT dengan operator; dan
3. Meningkatkan daya saing layanan OTT lokal.

6. Proyeksi Kebutuhan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia (2019-2030)

Studi jangka pendek ini menggunakan *mixed-method* yang bertujuan untuk mengetahui proyeksi jumlah kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sampai dengan tahun 2030, dan profesi-profesi TIK apa saja yang dibutuhkan oleh industri dan startup di Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0 ini.

Dari hasil studi ini diperkirakan Indonesia akan membutuhkan sebanyak 15.2 juta SDM di bidang TIK, dengan rata-rata kebutuhan per tahun sebanyak 768.480 untuk *enterprise* dan *startup*. Sedangkan *demand* profesi TIK sepuluh tertinggi yaitu *developer/programmer*, *data analyst/big data scientist*, diikuti oleh *network engineer*, *artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) specialist*, *enterprise architect*, *cloud & distributed computing specialist*, *IOT specialist*, *building information modelling specialist*, *information security specialist*, *graphic designer*. Kebutuhan SDM TIK tertinggi terlihat pada sektor usaha perdagangan besar eceran. Hal ini sejalan dengan kebutuhan *wholesale* dan *retail* untuk merambah pemasaran *online* sehingga memerlukan SDM TIK untuk mengelola *platform digital* yang digunakan.

Proyeksi jumlah kebutuhan SDM TIK di Indonesia dan profesi-profesi di bidang TIK dengan *demand* tertinggi diharapkan dapat dijadikan *baseline* kebijakan pengembangan SDM TIK di Indonesia, khususnya yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo sehingga lebih tepat guna dan tepat sasaran.

7. Perkembangan dan Strategi Arah Pengembangan Ekonomi Digital

Berdasarkan sistem perkembangan dan pengembangan ekonomi digital, ditemukan 4 (empat) butir strategi pengembangan dengan fokus pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk membangun ekonomi digital. Keempat strategi tersebut adalah mengembangkan e-agrologistik dan layanan keuangan digital inklusif melalui optimalisasi *nerve center* di dalam negeri menjadi prioritas strategi pertama dengan bobot 0.523. Kedua, mendorong lahirnya platform dan kreator produk digital dalam skala regional *e-commerce* dengan bobot 0.236. Ketiga adalah mengembangkan kebijakan *end to end business cycle* melalui pendekatan riset aksi kolaborasi multipihak yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman Indonesia dengan bobot 0.168. Keempat, menguatkan tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis sumberdaya lokal dengan bobot 0.073.

Implikasi hasil penelitian menyimpulkan perlu merubah metodologi riset kebijakan dalam pengembangan ekonomi digital ke depan. Satu pilihan metodologi dengan merujuk pandangan Dewan Riset Nasional (DRN) adalah membangun riset aksi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis prinsip pengembangan *Human Inquiry Methodology*. Untuk itu, piloting dalam skala regional untuk pengembangan ekonomi digital yang menampung keragaman kemajuan masyarakat Indonesia perlu dilakukan. Kegiatannya tidak hanya mencakup pengembangan desain tetapi juga mencakup implementasi atas desain yang memuat kekhasan perkembangan ekonomi lokal yang dikembangkan berbasis ekonomi digital.

Berdasarkan *expert judgement*, disimpulkan bahwa riset aksi dapat dimulai dengan pengembangan e-agrologistik dan layanan keuangan digital inklusif melalui optimalisasi *nerve center* dalam negeri. Proses pengembangan ini perlu juga dilandasi dengan mendorong lahirnya platform dan kreator produk digital yang dikelola oleh *e-commerce* dengan basis ekonomi lokal. Dalam prosesnya, kedua langkah inisiasi tersebut dapat diperbesar skalanya melalui pengembangan kebijakan *end to end business cycle* melalui pendekatan riset aksi kolaborasi multipihak yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman Indonesia. Untuk mendukung pengembangan diatas, diperlukan juga penguatan tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis lokalitas dalam konteks implementatif dan sinergis bagi seluruh pemangku kepentingan yang sudah dan yang akan terlibat di dalam pengembangan ekonomi digital Indonesia ke depan.

Satu pilihan fokus yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memperkuat daerah pinggiran khususnya Kawasan Perbatasan. Di kawasan ini diharapkan masyarakat diperkuat kesejahteraannya melalui ekonomi digital agar meningkatkan partisipasi mereka dalam mempertahankan garis batas negara.



Tidak ada kedaulatan tanpa kemakmuran artinya teknologi digital tidak hanya berhenti pada penyediaan konektivitas komunikasi, tetapi juga perlu bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Fokus kegiatan yang diusulkan sebaiknya adalah mendorong penurunan biaya pelayanan bagi masyarakat perbatasan berbasis teknologi digital, khususnya untuk akses terhadap bidang pendidikan, kesehatan, layanan kependudukan, dan komunikasi. Disamping itu ketersediaan ekonomi digital perlu diikuti oleh pendampingan pemanfaatan ekonomi digital untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti pemanfaatan untuk kunjungan wisata dan pengembangan produk budaya lokal. Fokus utama lain adalah memperkuat tata kelola pembangunan perbatasan khususnya kerjasama antar K/L dan beragam pihak yang berkepentingan berbasis teknologi digital. Lokus perhatian terhadap kawasan perbatasan ini disarankan memilih kawasan perbatasan dalam kategori *Oustanding Boundary Problems* (OBP). Oleh karena penguatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan ini menjadi penting untuk menjaga kelanjutan kedaulatan negara.

8. Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Secara keseluruhan, skor untuk kesiapan implementasi regulasi perlindungan data pribadi di Dinas Dukcapil Tingkat Kabupaten/Kota sudah lebih dari 60%, dengan aspek SDM yang memiliki skor keseluruhan paling tinggi (76,41%).

Berdasarkan pembagian wilayah (Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur), keseluruhan aspek memiliki skor diatas 50%. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah pada aspek infrastruktur, dimana pada wilayah Indonesia Bagian Timur skornya lebih tinggi dari wilayah lain. Perbedaan antara wilayah Timur dan Barat pada aspek infrastruktur adalah di Indonesia Barat mayoritas Dinas Dukcapil menggunakan infrastruktur elektronik, sedangkan di wilayah Timur masih dominan infrastruktur konvensional.

Dalam rangka mengimplementasikan Regulasi PDP diperlukan strategi yang mencakup beberapa aspek antara lain:



1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Diperlukan Standar Kompetensi SDM Pengelola Data Pribadi, baik dari level operasional sampai dengan level manajerial.
- Diperlukan pelatihan dan forum diskusi pengelola data pribadi yang terstruktur.

2. Regulasi terkait Perlindungan Data Pribadi

- Perlunya panduan pendukung RUU Perlindungan Data Pribadi.
- Perlunya Standar Keamanan Data Pribadi baik dalam bentuk dokumen fisik maupun elektronik.
- Harmonisasi peraturan terkait perlindungan data pribadi.

3. Sosialisasi

- Koordinasi antar Lembaga untuk sosialisasi internal dan eksternal.
- Konten sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan awareness masyarakat & pengelola data terkait perlindungan data pribadi.

9. Pengembangan Konsep GPR di Era Revolusi Industri 4.0

Aspek SDM GPR Kominfo diharapkan juga memiliki kompetensi di bidang *Big Data (data analyst)* dan *Artificial Intelligence-AI (data learning)*. Dengan kompetensi data analysis, GPR diharapkan mampu melakukan Sentimen Analisis Network-SNA terhadap berbagai isu-isu aktual yang ada. Dengan demikian mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan menangani berbagai hoax dan juga isu-isu yang dapat menjadi masalah nasional. Sedangkan, data learning adalah persiapan dalam era revolusi industri 4.0, yaitu otomatisasi. Kominfo memiliki mesin Pengais Konten, namun masih pada *level crawling data*. Jika Mesin Ais tersebut digunakan juga untuk memperkuat GPR dan dilengkapi dengan AI, di masa mendatang menjadi tools yang efektif dan efisien dalam melakukan deteksi dini terhadap *hoax* dan juga berbagai krisis yang akan terjadi di Indonesia.



Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas maka ada 7 (tujuh) rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran GPR Kominfo tidak saja sebagai *Disseminator*, tapi juga sebagai *Publicist*, *Framing Maker*, dan *Fact Checker* untuk menangkal *hoax* dan isu radikalisme melalui media sosial.
2. Menynergikan program, SDM, dan teknologi maju (mesin Ais) antara Ditjen Aptika dan Ditjen IKP dalam menghadapi *hoax* dan isu radikalisme. Penggunaan mesin Ais dioptimalkan untuk menghasilkan *daily brief* terkait isu-isu dalam bidang Politik, Sosial, Budaya, Hankam, dsb yang perlu diantisipasi dan ditangani oleh GPR.
3. Melakukan pemetaan ulang *stakeholders* GPR di era revolusi industri 4.0 sehingga sasaran kegiatan program berjalan dengan optimal.
4. Melakukan revitalisasi personil dan kelembagaan GPR termasuk di antaranya: *influencer*, *opinion maker*, *spoke persons* yang relevan dan memiliki kedekatan dengan publik untuk mengadaptasi perubahan.
5. Mengubah mindset GPR Kominfo dari pranata humas menjadi humas profesional yang tercermin dari perilaku dan kebiasaan keseharian yang aktif dalam menyebarkanluaskan pesan positif tentang pembangunan Nasional melalui akun media sosial milik pribadi maupun akun resmi Kominfo.
6. Meningkatkan kompetensi SDM GPR Kominfo dengan pelatihan di bidang teknologi maju seperti *big data* (*data analysis*, contoh: *Sentiment Analysis Network-SNA*) dan AI (*data learning*).
7. Membuat kebijakan/SOP sebagai panduan untuk penyelenggaraan GPR (humas pemerintah).

10. Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat

Survei bertujuan untuk mendapatkan gambaran penggunaan TIK dan implikasinya terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya data komprehensif dan mampu memberikan gambaran riil tentang penggunaan TIK serta aspek-aspek sosial budaya dan ekonomi yang dipengaruhi oleh penggunaan TIK rumah tangga dan individu.



Profil responden merata dari golongan usia remaja sampai dengan yang tua. 5,52% Rumah Tangga sudah berlangganan akses internet *Fixed Broadband* (meningkat dari tahun 2018: 4,77%). Pada level kecamatan: 34,6% kecamatan sudah terdapat akses internet *Fixed Broadband*. Rata-rata pengeluaran akses internet *Fixed Broadband* rumah tangga per bulan sebesar Rp. 277.558,2.

Pada pada Aspek Pendidikan, skill TIK yang paling besar dimiliki oleh masyarakat masih skill TIK dasar seperti menyalin (copy paste) teks/informasi dari dokumen (40,5%); Sedangkan skill untuk pemrograman masih sangat sedikit yaitu 2,24%.

Pada Aspek Sosial, terjadi pergeseran penggunaan gawai dari komunikasi telepon dan sms menjadi chatting (menggunkan akses internet). Pada aspek sosial terkait pelayanan pemerintah, masih 31,8% masyarakat yang pernah mengakses layanan pemerintah.

Pada Aspek Budaya, penggunaan perangkat TIK diyakini memudahkan responden membedakan informasi benar dan tidak benar. *Googling* paling sering dilakukan responden untuk menentukan kebenaran suatu informasi (74,5%).

Pada Aspek Ekonomi, 38,4% responden telah menggunakan TIK untuk menjual secara online; Dengan media yang digunakan untuk menjual secara online paling banyak adalah media sosial dan instant messaging. Masih 20% responden yang baru memanfaatkan *marketplace*, dan 4,87% yang membangun website sendiri. 50,1% responden telah menggunakan TIK untuk membeli secara online namun frekuensinya masih sangat jarang (>3 bulan sekali). *Marketplace* lebih banyak digunakan untuk membeli (41,55%) daripada menjual (20,00%); Banyak fitur di *marketplace* yang dirasakan memudahkan dan juga terdapat promo yang menarik bagi para pembeli. 53,75% responden bermasalah dengan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. 28,32% bermasalah dengan pengiriman barang. 11,30% bermasalah karena tidak ada kebijakan pengembalian. 3,33% bermasalah dengan keamanan data pribadi, dan 1,02% responden bermasalah dengan hal lainnya seperti penipuan, barang rusak, dan keterlambatan jadwal tiba. 34,76% responden belum pernah ada masalah.

11. Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik

Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan sampel 25 provinsi dari total jumlah provinsi di Indonesia 34, maka tercatat nilai indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik rata-rata provinsi adalah 65.10. Nilai indeks ini masih dianggap “cukup” atau “sedang”, dan penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik masih yang pertama kali dilakukan tahun 2019 ini. Yang kemungkinannya untuk tahun depan dapat “direvisi” untuk memperoleh nilai indeks yang ideal atau “baik”. Hal ini mungkin dapat ‘dibandingkan’ atau dapat melihat dengan nilai indeks dari kasus yang lain, seperti dari Indeks Demokrasi Indonesia. Dijelaskan oleh capaian IDI 2016 terkait dengan “potret demokrasi di Indonesia?”. Capaian overall indeks nasional sebesar 70,09 pada tahun 2016 tersebut, secara kuantitas mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan kinerja demokrasi di tanah air, bila dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2015 (72,82). Namun demikian, secara kualitas, penurunan capaian kinerja demokrasi di Indonesia pada tahun 2016, masih tetap pada kategori yang sama dengan tahun 2015 yaitu “sedang”. Ini berarti, “perjalanan masih panjang”, dan bahkan “mendaki” untuk dapat membus kategori “baik” (>80). Kemudian dapat dilihat pula dengan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2018, menurut Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers Periode yang lalu), tercatat “nilai indeksnya bahwa kemerdekaan pers meningkat, tetapi hoax dan penyalahgunaan kemerdekaan pers juga meningkat”. Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers adalah ke tiga kalinya Dewan Pers berhasil menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia yang menggambarkan situasi pers Indonesia secara lengkap sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Pada kali ke tiga ini Dewan Pers berhasil menyusun indeks secara lengkap di 34 provinsi selndonesia. Pada IKP 2017 indeks yang tersusun baru melingkupi 30 provpinsi, sedangkan IKP 2016 hanya mencakup 24 provinsi. Nilai IKP secara nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 69,00, yaitu angka yang menunjukkan bahwa nilai indeks kemerdekaan pers masih “agak bebas”. Ada tiga region yang memiliki indeks rata-rata di atas rata-rata nasional yaitu Kalimantan (77.10), Sumatera (73.15), dan Sulawesi (71.04). Keadaan ini membaik dibandingkan kondisi sebelumnya dimana indeks IKP 2017 adalah 68.95. Kenaikan kemerdekaan pers ini terjadi di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum. Namun, bila dilihat lebih detil, kemerdekaan pers Indonesia pada 2017 tetap seperti tahun sebelumnya mengalami defisit di hal kebebasan-untuk (*freedom for*).

Di satu sisi aspek-aspek kemerdekaan pers seperti kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan berada dalam kondisi baik. Independensi ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan dirasa menguatirkan.



Dalam penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2018 tergambarkan bagaimana konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media bersangkutan. Seperti yang kita ketahui beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Bila dikaitkan dengan berbagai indikator lain, pengaruh dan kendali kelompok kepentingan kuat dalam media massa di Indonesia masih besar. Pada era keterbukaan informasi dan komunikasi dewasa ini hak masyarakat untuk mengetahui segala hal tentang informasi senantiasa diberikan ruang yang lebih luas, meski demikian ruang kebebasan yang mereka peroleh tetap dibatasi oleh hak orang lain. Konsep demokrasi menghendaki adanya keseimbangan dalam menjalankan semua hak dan kewajiban, baik secara individu, kelompok, dan kelembagaan tertentu. Sebagaimana dalam hasil survei indeks informasi dan komunikasi ini, pemenuhan hak untuk mengetahui (*right to know*) dari masyarakat dapat di petakan dalam berbagai item pertanyaan. Misalnya ketika di ajukan pertanyaan pilihan, “apakah kondisi-kondisi dalam item pertanyaan dibawah ini sudah atau belum terwujud saat ini, jawaban yang beragam dari aspirasi responden.

Nilai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik masih dianggap “cukup” atau “sedang” dengan nilai rata – rata provinsi adalah 65.10 yang mempunyai makna bahwa pengelolaan informasi publik masih dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik. Perlu diingat bahwa penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik masih yang pertama kali dilakukan tahun 2019 ini. Yang diharapkan untuk tahun depan dapat “direvisi “ untuk memperoleh nilai indeks yang ideal atau “baik”, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.

Dari simpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan adalah, perlu dilakukan survei pemetaan untuk mengetahui pemenuhan hak masyarakat atas informasi (*rights to know*) dalam berbagai item pertanyaan, sehingga dapat diperoleh suatu nilai Indeks Pengelolaan dan Informasi Publik yang ideal.

Policy Brief

Dalam rangka menyediakan rumusan yang menguraikan alternatif kebijakan atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan, Badan Litbang SDM secara berkala menyusun *Policy Brief* untuk menyediakan gambaran singkat untuk pengambilan kebijakan bagi *decision maker* atau pembuat kebijakan sebagai regulator pada isu-isu terkini yang tengah mencuat di masyarakat. Hasil penelitian yang ada diharapkan mampu memberi masukan bagi *decision maker* dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif. Pada tahun 2019, Badan Litbang SDM melaporkan 5 (lima) *Policy Brief* kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan judul:

1. Mendongkrak Partisipasi dan Pengetahuan Masyarakat tentang Pemilu (Februari);
2. Arah Perkembangan & Pengembangan Ekonomi Digital di Sektor Finansial (Maret);
3. Mendorong Pengajaran *Coding* Sejak Dini Ketrampilan Dasar di Era Digital (Juni);
4. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Kebijakan Kontrol Penggunaan Ponsel Ilegal (Agustus); dan
5. Strategi Pengembangan GPR di Era Revolusi Industri 4.0 (November).

Selain kelima judul tersebut, Badan Litbang SDM juga mengembangkan tema Ekonomi Digital menjadi 4 (empat) judul *Policy Brief*, yakni:

1. Sinergitas Pemajuan Kebudayaan dan Ekonomi Digital Berbasis Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
2. Akselerasi Ekonomi Pertanian Digital;
3. Sistem Agrologistik Ekonomi Digital; dan
4. Perkembangan Dan Strategi Arah Pengembangan Ekonomi Digital.



"I'd say it was always in me - it's just what's required of you is very different in the moment that you become leader. When you're part of a team, you defer, and you're there to support your leader."

Jacinda Ardern

Jurnal Ilmiah dan Publikasi

Selain melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pemberian rekomendasi bagi kebijakan pemerintah, khususnya satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, perhatian utama dari *framework* penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah diseminasi informasi baik melalui jurnal penelitian maupun melalui media lainnya. Oleh karena itu, Badan Litbang SDM menerbitkan beberapa jurnal ilmiah dan publikasi lainnya seperti Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019 yang disajikan dalam bentuk infografis, majalah ilmiah maupun majalah semi populer yang juga merupakan bagian dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas peneliti.

Berikut daftar jurnal yang terbit tahun 2019 pada satker/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM:

No	Nama Jurnal	Link Jurnal	Status	Status Penanggung Jawab
1	Jurnal MTI (Masyarakat Telematika & Informasi)	https://mti.kominfo.go.id/index.php/mti	Terakreditasi Sinta 4 Berdasarkan Keputusan Direktur Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti : 30/E/KPT/2019 akan mengurus akreditasi tahun 2020 (baru terbit sebagai jurnal per 2018)	Pustlitbang APTIKA IKP
	Jurnal Diakom (Jurnal Media dan Komunikasi)	https://jurnaldiakom.kominfo.go.id/index.php/mediakom		
2	Buletin Pos dan Telekomunikasi	https://online.bpostel.com	Terakreditasi Sinta 2 Berdasarkan Keputusan Direktur Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti : 21/E/KPT/2018	Pustlitbang SDPPPI
	Jurnal Penelitian Pos dan Informatika	https://jurnal-ppi.kominfo.go.id	Terakreditasi Sinta 2 Berdasarkan Keputusan Direktur Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti : 32a/E/KPT/2017	
3	Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan	https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/index/jpkp	Terakreditasi Sinta 2 Berdasarkan Keputusan Direktur Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti : 28/E/KPT/2019	BBPSDMP Medan

Tabel 9. daftar jurnal yang terbit tahun 2019 pada satker/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM (bagian pertama)

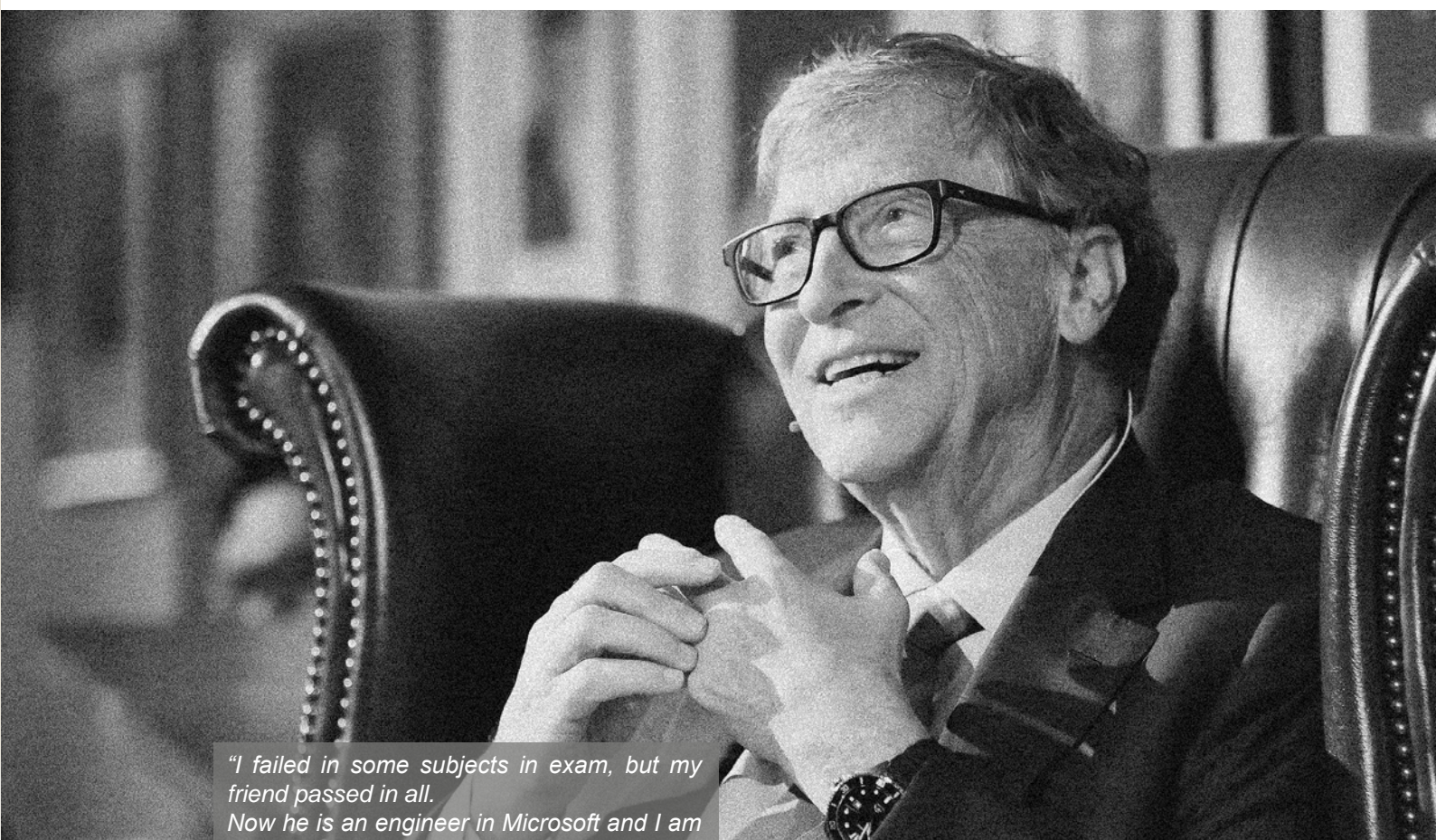
Tabel bersambung pada halaman berikutnya...

No	Nama Jurnal	Link Jurnal	Status	Status Penanggung Jawab
4	Jurnal penelitian komunikasi	https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas	Terakreditasi Sinta 2 Berdasarkan Keputusan Direktur Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti : 21/E/KPT/2018	BPSDMP Makassar
	Journal of Information Technology and Its Utilization (JITU)	https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jitu	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (Rencana pengajuan Akreditasi Tahun 2021)	
5	Jurnal Studi Komunikasi dan Media	http://kominfo.go.id/index.php/jskm/	Terakreditasi Sinta 2	BPSDMP Jakarta
	Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa	edisi cetak		
6	Jurnal penelitian komunikasi	http://bppkibandung.id/index.php/jpk	ISSN: 1410-8291 e-ISSN: 2460-0172 Terakreditasi Peringkat 2 Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Nomor: 30/E/KPT/2018	BPSDMP Bandung
7	E-Jurnal IPTEK-KOM	https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom	ISSN : 2527-4902 Akreditasi Sinta 3	BPSDMP Yogyakarta
	Majalah Gagasan			
	Buku Bunga Rampai			
8	Jurnal KOMUNIKA	https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika	Akreditasi Sinta 4 Berdasarkan Keputusan Direktur Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti : 14/E/KPT/2019	BPSDMP Surabaya
	Majalah Semi Ilmiah ISSUE SENTRAL			
9	Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan		Akan mengusulkan akreditasi pada tahun 2020	BPSDMP Banjarmasin
10	Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik	https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop	Akreditasi Sinta 2 Berdasarkan Keputusan Direktur Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti : 10/E/KPT/2019	BPSDMP Manado
11	Jurnal Ilmiah Produksi Siaran	ojs.mmtc.ac.id/index.php/jips/issue/archive	ISSN: 2461-0844, Belum terakreditasi	STMM
	Jurnal Ilmiah Pemberitaan	-	ISSN: 2460-6251, Belum terakreditasi	
	Jurnal Ilmiah Teknik Studio	-	ISSN: 2460-9153, Belum terakreditasi	
	Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi	-	ISSN: 2541-2086, Belum terakreditasi	
	Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi	ojs.mmtc.ac.id/index.php/jimik	ISSN: 2614-1272 e-ISSN: 2720-9857 Belum terakreditasi	

Tabel 10. daftar jurnal yang terbit tahun 2019 pada satker/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM (bagian kedua)

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019

Selain melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pemberian rekomendasi bagi kebijakan pemerintah, perhatian utama *framework* penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah diseminasi informasi. Badan Litbang SDM menerbitkan beberapa jurnal ilmiah dan publikasi lain seperti Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019 yang dikomandoi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menggambarkan kondisi profil SDM TIK tanah air baik dari sisi tingkat pendidikan, pekerjaan, sertifikasi baik dari sektor swasta maupun di lingkungan pemerintahan. Terdapat proyeksi bagaimana *shifting* bidang pekerjaan dan langkah yang dapat diambil pemerintah sebagai tindakan preventif untuk menyesuaikan dengan gerak cepat pesatnya kebutuhan *upskilling* pada industry TIK di masa yang akan datang.



"I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft."

Bill Gates

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019

BAB I Profil SDM Indonesia

Menurut data Sakernas RP5 hingga Agustus 2018, Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja usia produktif (15-64+ Tahun) sebanyak 131.005.641.

Dengan jumlah SDM yang cukup banyak, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas dari masyarakat. Kualitas dari angkatan kerja Indonesia belum sampai pada titik yang diharapkan.

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019

Permasalahan SDM Indonesia

Kenapa?

- Output pendidikan formal yang belum seluruhnya siap kerja
- Mismatch antara dunia pendidikan & dunia diklat dengan industri
- Kualitas tenaga kerja yang dicerminkan dari tingkat pendidikan yang masih rendah
- Status pekerjaan utama didominasi pekerja informal
- Produktivitas tenaga kerja relatif masih rendah dan belum semua industri merekrut SDMnya berbasis kompetensi

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019

1. Data Lulusan Bidang TIK

1.1 Data lulusan bidang TIK (D1 sampai S1 - Olahan data Dikti - Series)

Jumlah lulusan TIK setiap tahun memperlihatkan kecenderungan meningkat, meskipun terjadi penurunan jumlah lulusan di tahun 2016 dan tahun 2017 kembali menunjukkan tren kenaikan.

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019

1.4 Data lulusan bidang TIK yang bekerja & tidak bekerja (Olahan data Sakernas - Series)

Tahun	Tidak Bekerja	Bekerja
2016	370.403	2.041.023
2017	1.018.725	2.172.550
2018	983.740	2.506.998

Data ini merupakan Data Sakernas RP5 yang diolah kembali dari data resmi. Definisi bekerja menurut ILO adalah dan merujuk pada hubungan, termasuk data, adalah hubungan yang berjangka dengan asumsi terdapat 1 jam dalam seminggu, sedang baik dari sudut budaya dan dari lulusan pendidikan bidang TIK, telah bekerja dalam rangka waktu kerja 10 tahun terakhir.

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019

1.6 Proyeksi SDM

Proyeksi Lulusan TIK 2025

Tahun	Lulusan S1	Lulusan D1-S1
2018	370.403	2.041.023
2019	374.423	2.044.000
2020	378.443	2.046.977
2021	382.463	2.049.954
2022	386.483	2.052.931
2023	390.503	2.055.908
2024	394.523	2.058.885
2025	398.543	2.061.862

Jumlah Lulusan TIK tahun 2025 sebanyak 3.627.706 orang

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019

Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja di 2025

Jumlah Penduduk: **284.829.000**

Tenaga Kerja: **138.923.926**

Penelitian SDPPPPI-Badan Litbang SDM Kominfo memproyeksikan hingga tahun 2025, membutuhkan tenaga kerja 1,3 juta di Lapangan Usaha di sektor Komunikasi dan Informatika

BAB II - Potret SDM TIK dan Kehumasan ASN Provinsi

PRASURVEY

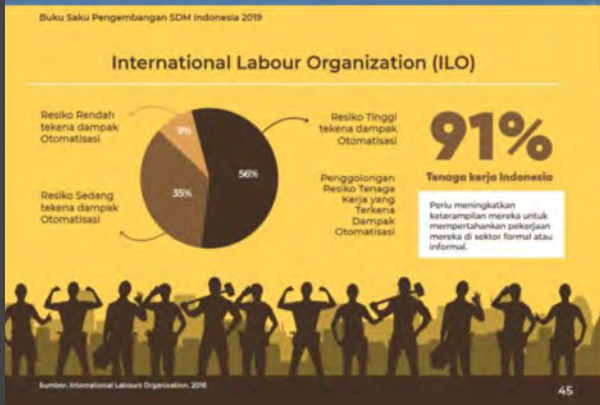
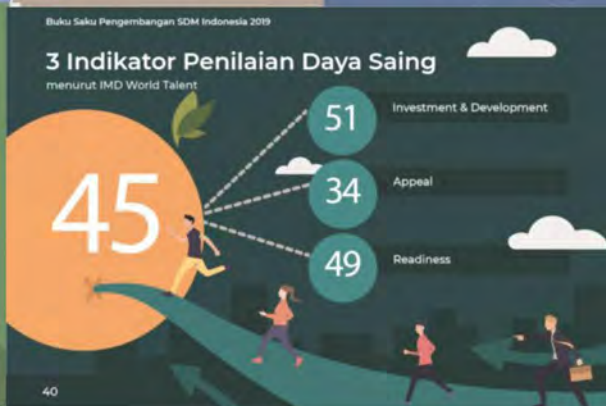
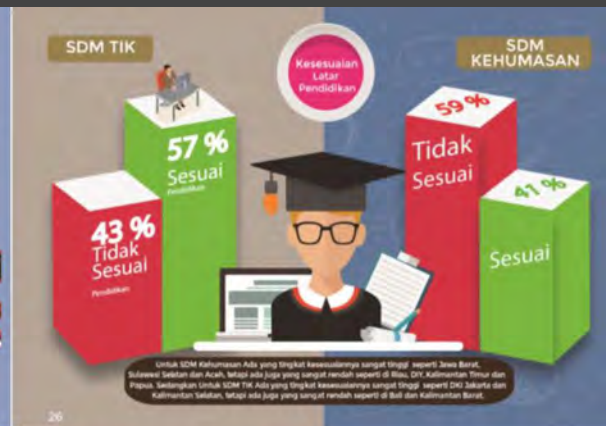
Sebelum dilakukan survei untuk mendapatkan Potret / gambaran kemampuan SDM TIK dan kehumasan di setiap provinsi sampel, terlebih dahulu dilakukan kegiatan pra-survei:

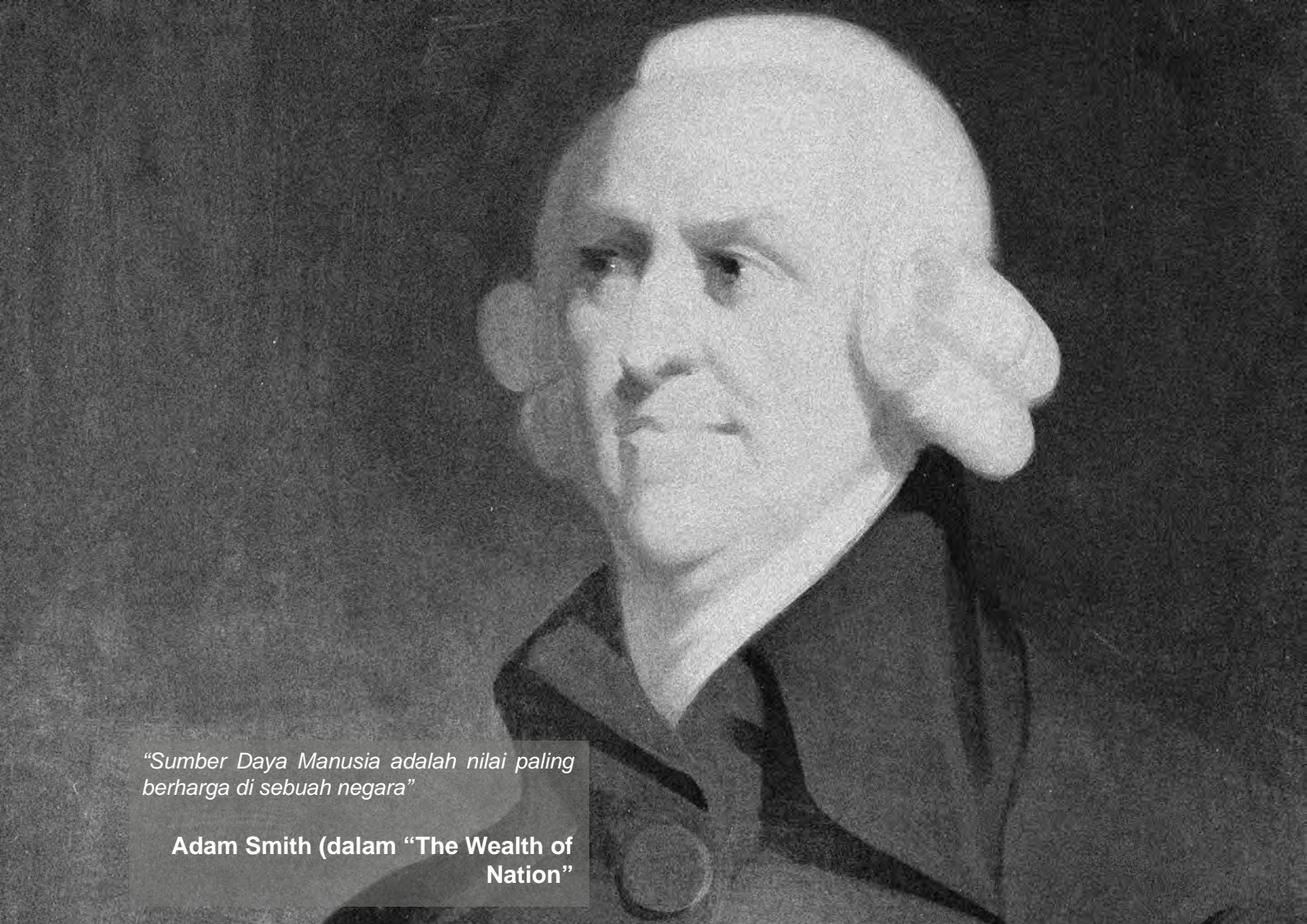
Kegiatan pra survei ini pada dasarnya merupakan kegiatan pemetaan atau listing SDM TIK dan Kehumasan baik yang berstatus ASN (PNS, PPPK) dan juga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri lainnya seperti Honorar

JUMLAH SDM TIK DAN KEHUMASAN PEMERINTAH PROVINSI

Kategori	Jumlah
SDM ASN TIK Indonesia	13.336
SDM ASN KEHUMASAN Indonesia	4.391

Buku Saku Pengembangan SDM Indonesia 2019



A black and white portrait of Adam Smith, an elderly man with a powdered wig, looking slightly to the left. The background is dark and textured.

"Sumber Daya Manusia adalah nilai paling berharga di sebuah negara"

Adam Smith (dalam "The Wealth of Nation")

2019

**PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA**

FGA

FRESH GRADUATE
ACADEMY

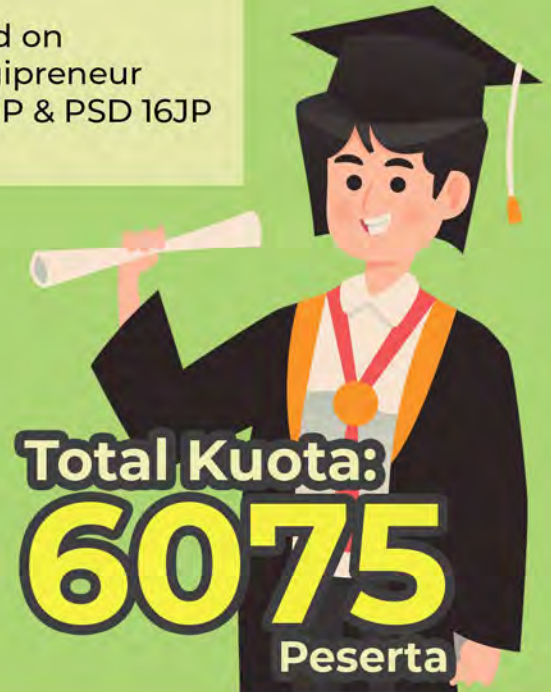
Penyelenggara:

Universitas Negeri
dan Swasta

**Mitra &
Tema Pelatihan**

1. CISCO (Cybersecurity)
Kuota: 1050 Peserta
2. AWS
(IoT, Machine Learning,
AI, Cloud Computing,
Big Data)
Kuota: 5025 Peserta

Add on
Digipreneur
70JP & PSD 16JP



Jam Pelajaran:
144 JP
(2 Bulan)

Sasaran Peserta:

Lulusan Pendidikan Tingkat
D3/D4/S1 yang terkait dalam
bidang TIK dan MIPA

VSGA

VOCATIONAL SCHOOL
GRADUATE ACADEMY

Penyelenggara:

Politeknik Negeri,
BPPTIK

Mitra & Tema Pelatihan:

1. SKKNI (Junior Network Adm)
Kuota: 1250 Peserta
2. SKKNI (Junior Web Developer)
Kuota: 950 Peserta
3. SKKNI (Junior Mobile Programmer)
Kuota: 1525 Peserta
4. SKKNI (Junior Graphic Designer)
Kuota: 700 Peserta
5. SKKNI (Intermediate Animator)
Kuota: 800 Peserta



Total Kuota:
5225
Peserta

Add on
Digipreneur
70JP &
PSD 16JP

Jam Pelajaran:
72 JP
(1 Bulan)

Sasaran Peserta:
Lulusan SMK
semua jurusan

Skema
Penyelenggaraan
Program Digital Talent
Scholarship 2019



CTA

CODING TEACHER ACADEMY

Penyelenggara:

BPRTIK, Pusdiklat,
BPPTIK, STMM

Jam Pelajaran:

5 Hari kerja
Offline dan Online

Mitra & Tema Pelatihan

Cisco (Programming
Essentials in Python)
Kuota: 2000 Peserta

Sasaran Peserta:

Guru SMK/SMA/MA yang
mengajar di bidang TIK
(Terbuka bagi Guru PNS dan
Non-PNS)



OA

ONLINE ACADEMY

Penyelenggara: Online Course

1. Khusus Associate Cloud Engineer perlu ToT
2. Digipreneur merupakan add on FGA dan VSGA diampu oleh OA jumlah peserta 11.225 (70JP)*
3. PSD/Professional Skills Development: pelatihan soft skill untuk VSGA, FGA, OA. Program pasca pelatihan diampu oleh Pokja Pasca Pelatihan dan OA

Mitra & Tema Pelatihan:

1. Cisco (CCNA Cybersecurity Operations) Kuota: 750 Peserta
2. Cisco (CCNA Security) Kuota: 750 Peserta
3. Cisco (Programming Essentials in Python) Kuota: 1500 Peserta
4. Cisco (IT Essentials) Kuota: 2000 Peserta
5. Microsoft (Artificial Intelligence) Kuota: 300 Peserta
6. Microsoft (Cybersecurity) Kuota: 300 Peserta
7. Microsoft (Internet of Things) Kuota: 300 Peserta
8. Microsoft (Data Analysis) Kuota: 300 Peserta
9. Microsoft (Data Science) Kuota: 300 Peserta
10. LAN & Microsoft (Digital Policy) Kuota: 1500 Peserta
11. AWS (Artificial Intelligence) Kuota: 1000 Peserta
12. AWS (Big Data) Kuota: 2000 Peserta
13. Google (Associate Cloud Engineer) Kuota: 1000 Peserta
14. Google (Android) Kuota: 1000 Peserta

Jam Pelajaran:

70 JP

Sasaran Peserta:

Umum, kecuali untuk
Digital Policy adalah
ASN PKN PIM II

Total Kuota:
13.000
Peserta

Digital Talent Scholarship

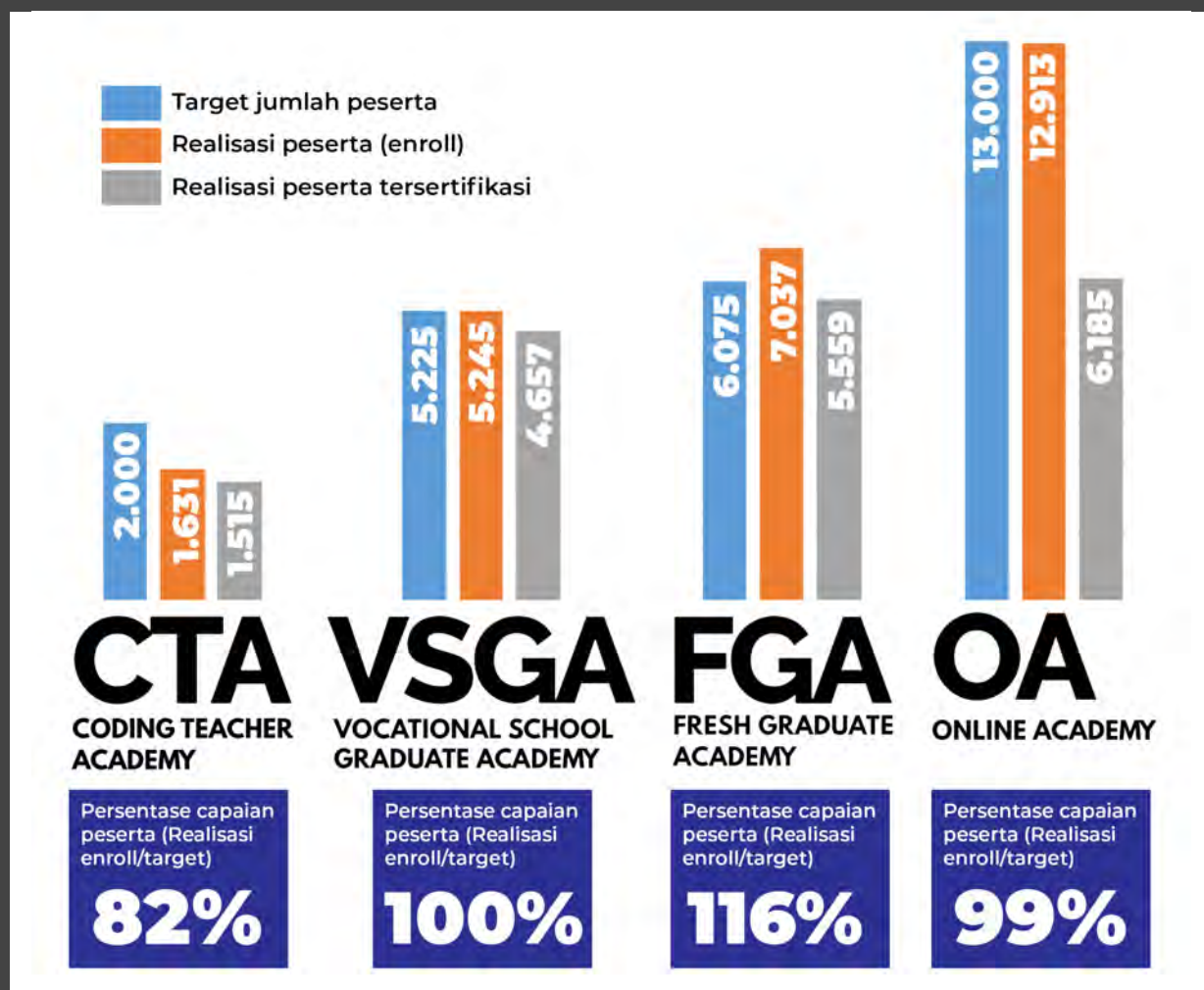
Pada tahun 2019, BLSDM berhasil menyelesaikan dokumen kerja sama (MoU dan PKS) dengan mitra Perguruan Tinggi (Universitas/ Politeknik) Negeri maupun Swasta sejumlah 54 PT dan tahun 2020 sejumlah 89 PT serta PKS untuk program pasca pelatihan.

Pelaksanaan program ini juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi global untuk penyusunan dan penyediaan kurikulum, modul (materi ajar), *platform* serta instruktur untuk pelaksanaan *Training of Trainer* (TOT) bagi calon pengajar.

Akademi pelatihan DTS 2019 adalah sebagai berikut:

- Fresh Graduate Academy (FGA)
- Vocational School Graduate Academy (VSGA)
- Coding Teacher Academy (CTA)
- Online Academy (OA)

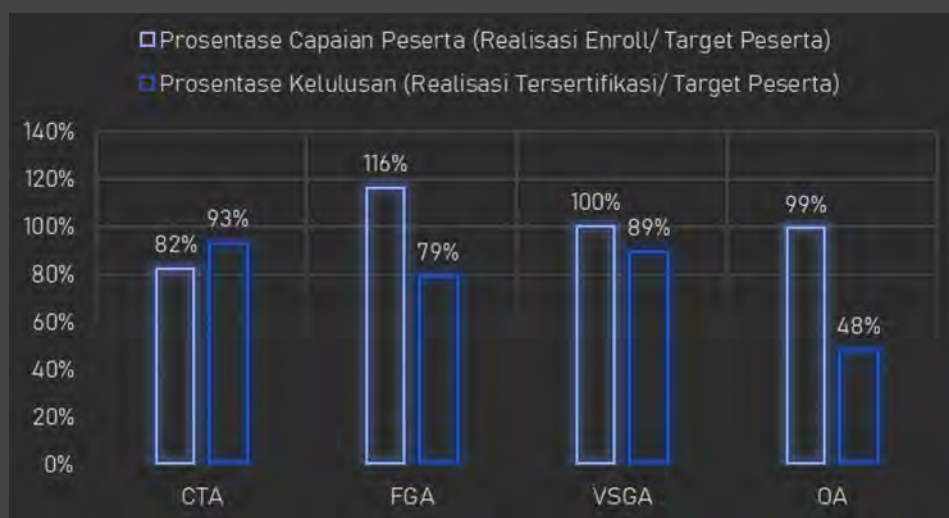
Capaian jumlah peserta pada beberapa akademi melampaui target. Berikut grafik target dan capaian tiap akademi:



Gambar 8.
Target dan capaian tiap akademi Digital Talent Scholarship Tahun 2019

	Fresh Graduate Academy (FGA)	Vocational School Graduate Academy (VSGA)	Coding Teacher Academy (CTA)	Online Academy (OA)	TOTAL
Kuota Beasiswa	6.075	5.225	2.000	13.000	26.300
Jumlah Pendaftar	12.210	8.977	2.033	26.358	49.578
Peserta Diterima	7.490	6.117	1.817	15.720	31.144
Jumlah Peserta	7.037	5.245	1.631	12.913	26.826
Peserta Lulus	5.559	4.657	1.515	6.185	17.916

Tabel 11.
Rekap capaian peserta program Digital Talent Scholarship 2019

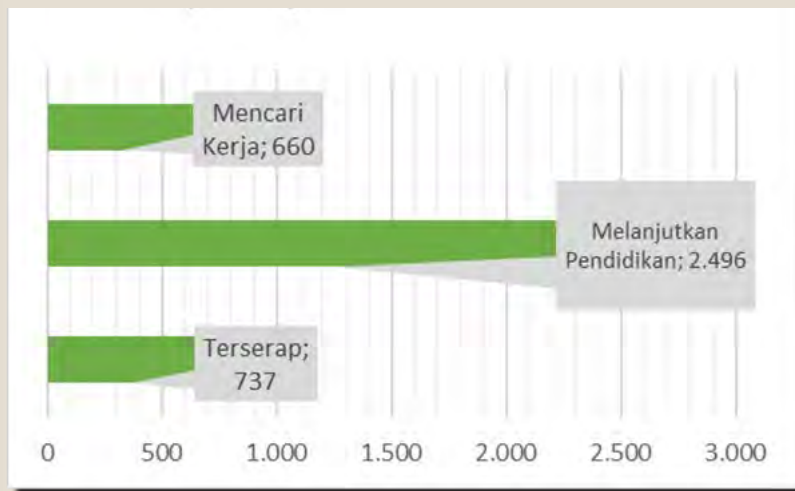


Gambar 9.
Prosentase capaian realisasi peserta dan kelulusan peserta DTS 2019

Dari data di atas, peserta DTS tersertifikasi pada akademi FGA adalah sebanyak 5.559 dan peserta DTS tersertifikasi akademi VSGA adalah sebanyak 4.657 orang. Namun, identifikasi data peserta terserap dari alumni kedua akademi tersebut mengalami kendala. Dari jumlah di atas, tidak seluruh peserta merespon kuesioner untuk menemukenali lulusan kedua akademi tersebut yang terserap industri.

Hingga Desember 2019, hasil survei menunjukkan 7.289 alumni memberikan feedback (3.396 alumni FGA dan 3.893 alumni VSGA). Pertanyaan kuesioner diarahkan untuk mengidentifikasi alumni yang berstatus bekerja, mencari pekerjaan, magang, kuliah, *freelance*, lanjut pelatihan, dan wirausaha. Alumni yang masuk kategori terserap industri adalah alumni yang bekerja, magang, *freelance*, dan wirausaha. Sementara alumni yang masuk kategori melanjutkan pendidikan adalah alumni yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi (formal) atau pelatihan (pendidikan informal).

Sebanyak 1.210 alumni FGA dari total 5.559 peserta FGA tersertifikasi (21%) dan 737 alumni VSGA dari total 4.657 peserta VSGA tersertifikasi diserap industri (16%). Sehingga capaian total alumni FGA dan VSGA tersertifikasi yang diserap industry adalah sebanyak 1.947 dari 10.216 total peserta FGA dan VSGA tersertifikasi dengan prosentase 19,05%. Dengan target awal yang ditetapkan sebesar 20%, maka Badan Litbang SDM mampu meraih performa sekitar 95%.



Gambar 10.
Penyerapan alumni VSGA



Gambar 11.
Penyerapan alumni FGA

Dalam pelaksanaan program DTS 2019, masih terdapat kendala-kendala yang diidentifikasi menyebabkan belum optimalnya program ini antara lain:

- a. Latar belakang pendidikan peserta pada setiap skema pelatihan masih heterogen.
- b. Kesulitan mencari akomodasi dengan harga terjangkau bagi peserta luar kota sehingga menurunkan minat peserta menyelesaikan sampai akhir pelatihan.
- c. Waktu pelatihan yang masih dirasa terlalu ketat untuk materi pelatihan yang disampaikan.
- d. Adanya ketidaksesuaian antara materi ujian dengan materi pelatihan.

Dari kendala yang terjadi pada pelaksanaan tahun 2019, untuk pelaksanaan selanjutnya kami memandang perlunya dilakukan *review* dan *update* terhadap beberapa materi dalam silabus terutama terkait dengan pembaharuan teknologi serta teknik dengan yang dibutuhkan di dunia industri.

Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika

Salah satu agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan yang strategis juga menjadi kebijakan pasar tenaga kerja tahun 2025. Untuk mempersiapkan hal tersebut, peningkatan jumlah tenaga terampil untuk menghadapi keterbukaan pasar merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Pengembangan SDM Nasional bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa telah diupayakan Kementerian Kominfo sejak didirikan pada tahun 2005. diantaranya melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Pasal 14 yang menyatakan tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan lembaga sertifikasi profesi dalam sistem pelatihan kerja nasional. Berdasarkan PP tersebut, Kementerian Kominfo bertugas sebagai instansi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo dimana kompetensi SDM dilakukan melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra dan dibuktikan melalui Sertifikat kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pada tahun 2019, sebanyak 10.121 peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika dinyatakan kompeten dari total 12.309 jumlah peserta sertifikasi SKKNI (termasuk di dalamnya peserta DTS skema VSGA) maka sebanyak 82% Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI. Dengan target awal yang ditetapkan sebesar 70%, maka performa Badan Litbang SDM 12 poin lebih tinggi daripada target semula, yakni sebesar 117%.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari capaian satuan kerja dan UPT penyelenggara sertifikasi SKKNI yakni Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, STMM Yogyakarta, BBPSDMP Kominfo Medan, BBPSDMP Kominfo Makassar, BPSDMP Kominfo Jakarta, BPSDMP Kominfo Bandung, BPSDMP Kominfo Yogyakarta, BPSDMP Kominfo Surabaya, BPSDMP Kominfo Banjarmasin, BPSDMP Kominfo Manado, BPPTIK Cikarang dan BPRTIK Ciptat.

Berikut gambaran capaian pengembangan SDM yang profesional di bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan dan sertifikasi dalam rangka mendukung *digital economy* dari tahun ke tahun :

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	7.575 orang	70% (dari 1600 peserta)	70% (dari 10.650 peserta)	70% (dari 6.000 peserta)	70% (dari 12.000 peserta)
Realisasi	63,53% (7.488 kompeten dari 11.785 peserta)	76,9% (1.398 kompeten dari 1.817 peserta)	81,58% (9.407 kompeten dari 11.531 peserta)	81,05% (5.129 kompeten dari 6.328 peserta)	82% (10.121 kompeten dari 12.309 peserta)

Tabel 12.
Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI

Digital Leadership Academy (DLA)

Merupakan bagian dari rangkaian *Digital Talent Scholarship* (DTS) yang bekerja sama dengan *GSM Association* (GSMA) yang merupakan perkumpulan dari operator seluler seluruh dunia yang berganggotakan lebih dari 750 operator telekomunikasi dan hampir dari 400 perusahaan yang bergerak di ekosistem telekomunikasi meliputi produsen perangkat, perusahaan piranti lunak dan internet. Program ini merupakan program pengembangan talenta digital tingkat tinggi yang dikhususkan bagi *Senior-level Bureaucrats, Chief-Level Practitioner* dan akademisi.

Program DLA tahap I ditargetkan bagi pegawai internal Kementerian Kominfo dengan mengangkat tema 5G dan *Internet of Things* (IoT). Tujuan Program DLA 5G dan IOT adalah untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan terhadap isu-isu terbaru bidang 5G dan IoT untuk mendukung pembuatan kebijakan berdasar teknologi baru bidang 5G dan IoT. Tema ini dipilih dengan dasar pertimbangan bahwa teknologi 5G akan diluncurkan tahun depan di berbagai negara di dunia dan beberapa negara telah meluncurkan jasa komersial 5G pada tahun 2019. Negara teknologi maju dunia juga telah banyak mengaplikasikan teknologi IoT di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Pelatihan bidang 5G dan IoT akan memberikan peningkatan ilmu para pembuat kebijakan dengan tolak ukur dan observasi *lessons learned* pembuatan kebijakan dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu menggunakan teknologi 5G dan IoT.

Yogyakarta: KOMINFO-GSMA 5G and IoT Capacity Building Workshop

“KOMINFO-GSMA 5G and IoT Capacity Building Workshop” dilaksanakan pada tanggal 2-5 September 2019 di Hotel Harper Mangkubumi, Yogyakarta. Pelatihan ini diikuti oleh 31 peserta dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, 14 peserta dari Hutchison 3 Indonesia serta 4 peserta dari Smartfren.

Pelatihan *Digital Leadership Academy 5G dan IoT (Capacity Building Workshop)* dilakukan dengan tujuan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para pelaksana industri di bidang telekomunikasi terkait isu-isu terbaru teknologi. Pada pelatihan ini, topic yang diangkat adalah 5G dan *Internet of Things*. Pelatihan dipandu 2 instruktur dari GSMA yaitu Johnny Kim, *Strategic Engagement Director and head of North-East Asia GSMA* dan Niall Magennis, *Senior Director, GSMA*. Materi yang diberikan adalah:

1. *What is IoT?*
2. *Forecasts on the growth of IoT*
3. *A High Level Technology Overview of Mobile-Enabled IoT*
4. *Activity: Matching IoT applications to technologies*
5. *Business models in IoT*
6. *Government strategies for driving IoT adoption*
7. *The Development of Mobile Technology*
What is 5G? 4G versus 5G
8. *The Global Status of 5G and Forecasts for Future Growth 5G business models*
9. *5G deployment strategies and evolution of 5G technology*
10. *Key technical enablers*
11. *Network slicing*
12. *Spectrum*
13. *5G and RF-EMF*
14. *The Capacity Challenge*
15. *2G/3G Rationalisation*

Korea Selatan: Study Visit 5G Experience Centre

Bertempat di Korea Selatan, dengan kota-kota pelaksanaan kegiatan terdiri dari Seoul, Busan, Daejeon, Suwon, dan Kota Administratif Sejong pada 15-19 November 2019 dengan melibatkan peserta dari pejabat Eselon IV dan staf yang tugas dan fungsinya terkait dengan 5G dan IoT dari satuan kerja terkait di lingkungan Kemenkominfo dan telah lulus seleksi Program *Digital Leadership Academy on 5G and IoT*. Kegiatan *Study Visit 5G Experience Centre* diawali dengan Korea-Indonesia *5G Smart Space Collaboration Workshop*. *Workshop* dimaksud diselenggarakan atas kerjasama dari Kementerian Kominfo, Busan EDC, NEFS, dan Korea Information Processing Society. Penyelenggaraan *workshop* dimaksud dikelola oleh Yonsei University CPRC, SSE-ITRC, dan *GSMA Capacity Building*.

Pertemuan membahas tiga agenda pokok, yakni (1) *5G Migration and Policy*, (2) *Smart City*, dan (3) *Possible Areas for Cooperation in relation to 5G*. Dalam panel diskusi terkait kerja sama dan *lesson learned* yang dapat dilaksanakan antara Indonesia dan Korea,

Disampaikan oleh panelis bahwa Indonesia harus belajar dari Korea untuk tidak melaksanakan digitalisasi di semua bidang karena tidak semua bidang harus dilaksanakan digitalisasi.

Korea Selatan: Study Visit 5G Experience Centre



Busan Smart City Project Exposure



Delegasi mengunjungi *Busan Smart City Monitoring Centre* dan diterima oleh perwakilan Pemerintah Kota Busan yang bertanggungjawab pada proyek *Smart City*.

Tahun 2018 Busan meluncurkan *National Smart City Pilot Project Eco Delta Smart City* yang memanfaatkan teknologi revolusi industry ke 4. Inovasi urban berkelanjutan meliputi *Digital City Platform* yang akan memberi wadah digital agar masyarakat dapat mengumpulkan dan memanfaatkan data secara bebas, *Robot City Platform* dan *Augment-Reality Platform*.

ETRI – Ministry of Science and ICT Meeting

Delegasi mengunjungi kantor *Electronics and Telecommunication Research Institute* (ETRI) di Daejeon untuk berdiskusi bersama ETRI dan *Ministry of Science and ICT* (MSIT) terkait kebijakan dan peluncuran 5G



Ministry of Land and Infrastructure Meeting

Delegasi berdiskusi dengan *Ministry of Land & Infrastructure* di Sejong terkait rencana relokasi ibukota ke Kalimantan, *blueprint* pemindahan kota administratif, serta implementasi pemindahan kementerian.

SK Telecom Digital Identity and Authentication Meeting

Delegasi berdiskusi terkait *Digital Identity and Authentication*. SK Telecom merupakan operator telekomunikasi Korea yang memegang 47% *market share* sekaligus leading sector bidang digital identity and authentication, dengan meluncurkan sistem PASS. PASS adalah sistem identifikasi personal menggunakan nomor ponsel yang dapat memberikan jasa autentifikasi mudah dan terpercaya bagi *end-user* dan korporat. PASS telah digunakan oleh 36.000 perusahaan. Sejak bulan Mei 2018, 3 operator telekomunikasi SK Telecom, KT dan LG U+ menggunakan PASS tidak hanya untuk autentifikasi personal tapi juga untuk log in ke mobile handset dan tanda tangan digital.



REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Digital Economy and Financial Technology

DLA kali ini merupakan program pengembangan talenta digital tingkat tinggi yang dikhususkan bagi *Senior-level Bureaucrats, Chief-Level Practitioner* dan akademisi. Program pengembangan kapasitas tingkat tinggi untuk tataran pejabat pembuat kebijakan setingkat eselon 2 dan 3 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait tema digital ekonomi dan teknologi finansial serta memberikan eksposur ekosistem digital bagi para pembuat kebijakan di Kementerian yang memiliki tugas fungsi pembuatan kebijakan bidang ekonomi digital dan teknologi finansial. Dalam pelaksanaannya, Badan Litbang SDM bekerjasama dengan *Ant Financial*, perusahaan teknologi di bawah Alibaba yang bergerak dalam bidang layanan jasa inklusi finansial. Dalam kerja sama ini, program DLA masuk dalam *10 x 1000 Tech for Inclusion Program Workshop* yang diselenggarakan oleh Ant Fin. Program ini melibatkan para pejabat Eselon II dan II dari internal Kementerian Kominfo dan 10 Kementerian lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait pembuatan kebijakan bidang ekonomi digital dan teknologi finansial yang dilaksanakan dari tanggal 25 – 28 November 2019 di kantor pusat *Ant Financial Service, Z Space, Hangzhou*.

Alibaba Museum dan Hema Supermarket

1. *Digital Technology & Inclusive Growth* yang dijelaskan oleh Mr. Long Chen (*Director of Luohan Academy & VP Ant Finance*).
2. *Financial Inclusion in Asia – Trends and Implications* dijelaskan oleh Fangfang Jiang (*Head of Digital Financial Service Asia, IFC*).
3. Kunjungan ke Museum Alibaba
4. Materi Sabrina Peng (*VP Ant Financial and Partner of Alibaba Group*)
5. Hema Supermarket merupakan salah satu inklusi finansial dalam segi jual-beli kebutuhan makanan sehari-hari.





Site visit Desa Bainiu

1. *Rural Finance Development in China / Digital Financial Rural*, yang dipaparkan oleh Bo Peng (GM of Rural Finance Dept, At Finance)
2. *“China’s Digital Economy and Alibaba Story”* yang dipaparkan oleh Neo Cai (Senior Advisor of Academic Council, Alibaba Group)
3. Site visit Desa Bainiu yang merupakan salah satu desa yang menggunakan e-commerce dalam melakukan transaksi hasil desa

Workshop hari ke-3

1. *“Intelligent Lending for Retail Merchant”* yang dibawakan oleh Quan Yu (GM of Risk Management, Ant Financial)
2. *“Security and Risk Management”*, yang dipaparkan oleh Rui Xiongwen (VP & Head of Security and Risk Management, Ant Financial)
3. *“Unlock Value of Financial Inclusion through Digital Identity”* yang dipaparkan oleh Ya Tao (Product Manager of ZOLOZ)
4. *“Current Development and Trend in Global Payment”* yang dipaparkan oleh Ming Chiu (Associate Director, Ant Research Institute)



Workshop hari ke-4

1. *“Cloud Computing & Digital Transformation”* yang dipaparkan oleh Kevin Liu (Head of Internasional Industri Solution, Alibaba Cloud Intelligence Internasional) dan juga Alex
2. *“BASIC – The Pillar Technologies for Digital Financial Services”* (Li Cheng-CTO, Ant Financial)
3. Diskusi kelompok

Penyelenggaraan Beasiswa Pascasarjana

Dalam rangka memajukan taraf kehidupan bangsa melalui penciptaan SDM Indonesia yang handal dan profesional serta berdaya saing tinggi, Kementerian Kominfo meluncurkan program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri di bidang komunikasi dan informatika sejak tahun 2007.

Beasiswa Pascasarjana ditujukan bagi aparatur pemerintah, industri dan masyarakat Indonesia di bidang komunikasi dan informatika, serta bagi pegawai internal Kementerian Kominfo.

Pada mulanya, penyelenggaraan Beasiswa Pascasarjana ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi (setelah beberapa kali berganti nomenklatur dari Puslitbang Literasi dan Profesi, Pusat Pengembangan dan terakhir menjadi Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi/Pusbang Proserti). Mengantisipasi perubahan struktur organisasi yang kerap terjadi, Sekretariat Badan Litbang SDM sejak tahun 2017 menjadi pelaksana program Beasiswa Luar Negeri. Tahun 2019 merupakan tahun perdana Beasiswa Dalam Negeri juga dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Litbang SDM.

Program beasiswa pascasarjana ini diharapkan dapat menciptakan SDM nasional bidang kominfo yang kompeten melalui pendidikan formal sehingga sesuai dengan standar kompetensi profesi. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung penguatan ekonomi digital di Indonesia. Diharapkan program Beasiswa Pascasarjana dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM profesional di bidang TIK sebagai agen-agen perubahan dalam pengembangan industri informasi serta ekonomi digital. Program Studi disesuaikan dengan kebutuhan khusus birokrasi pemerintah pusat dan daerah (*tailor-made programme*) serta perkembangan TIK secara nasional.



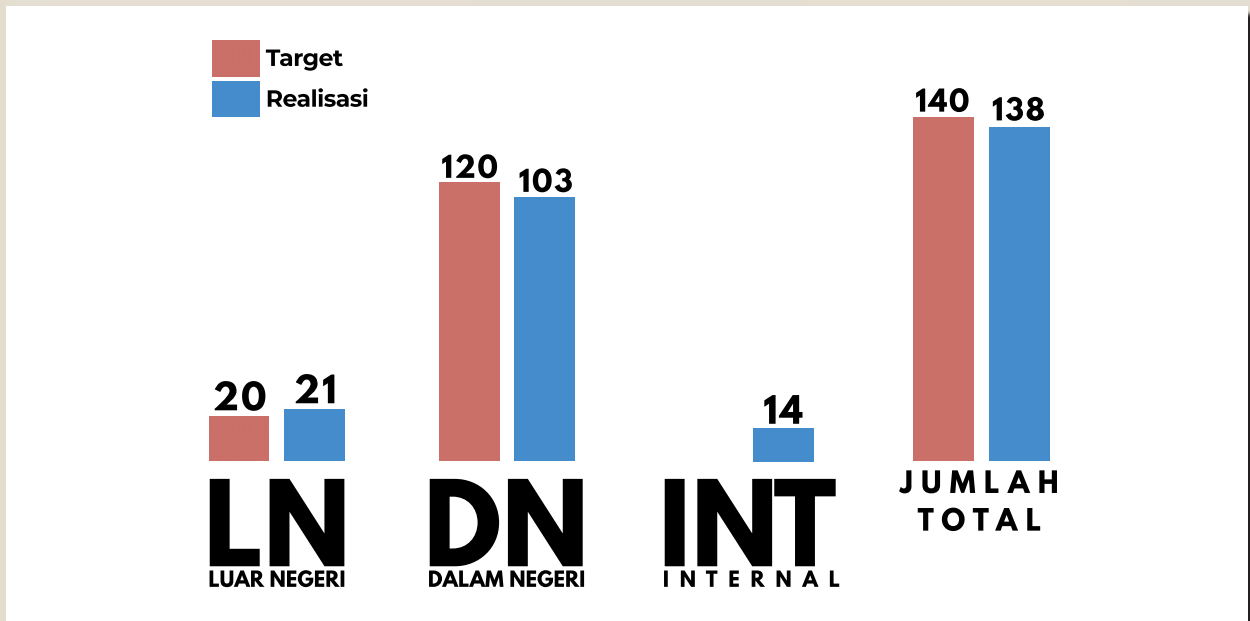
Program beasiswa magister dalam negeri diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia untuk jurusan CIO & IT dan Ilmu Komunikasi, diantaranya UI, UGM, ITB, ITS, UNAIR, USU, UNHAS, UNS, dan UNAND dengan jurusan sebagai berikut:

KOMUNIKASI	
Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Ilmu Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
Ilmu Media dan Komunikasi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
INFORMATIKA	
<i>e-Government</i>	Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada
Layanan Teknologi Informasi (LTI)	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung
Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi (RMKI)	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung
Pengelola TIK Pemerintahan (Jurusan Teknik)	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
MTI <i>e-Government</i>	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
Manajemen Keamanan Jaringan Informasi (MKJI)	Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Tabel 13.
Program beasiswa magister dalam negeri

Program Magister beasiswa luar negeri Kemenkominfo bekerja sama dengan Tsinghua University (Republik Rakyat Tiongkok) dan International Institute of Information Technology Bangalore/IIITB (India) dengan jurusan terkait *Public Policy* dan Teknologi Informasi untuk mendukung Ekonomi Digital.

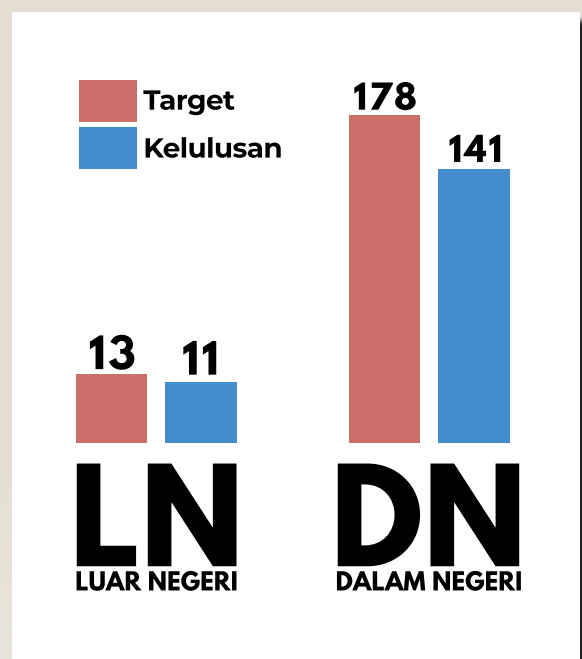
Dari target sebanyak 140 peserta, capaian penerimaan mahasiswa pascasarjana TA 2019 adalah 138 peserta atau sekitar 98,6%. Berikut gambaran penerimaan Beasiswa Pascasarjana tahun anggaran 2019:



Gambar 12. Penerimaan Beasiswa Pascasarjana tahun anggaran 2019

Sementara untuk tingkat kelulusan, dilansir dari data target penerima beasiswa angkatan 2016 dan 2017 adalah sebesar 79,58%. Dari 191 penerima beasiswa yang semula ditargetkan lulus pada tahun 2019, hanya 152 orang penerima beasiswa yang berhasil lulus tepat waktu. Banyak factor penyebab melesetnya kelulusan penerima beasiswa, di antaranya karena belum menyelesaikan tesis, pembimbing tesis yang kurang koordinatif, pergantian judul tesis mendekati habisnya masa aktif tugas belajar, tidak fokus karena harus mengerjakan tugas kantor/kedinasan di saat bersamaan, masa berlaku tugas belajar habis sehingga penerima beasiswa diwajibkan kembali ke instansi asal, alasan kesehatan dan lain sebagainya.

Detail angka target dan realisasi kelulusan penerima beasiswa dalam dan luar negeri dapat dilihat pada grafik di samping.



Gambar 13. Target dan realisasi kelulusan penerima beasiswa dalam dan luar negeri

Beasiswa Dalam Negeri (Eksternal dan Internal)

Pelaksanaan Program Beasiswa S2 Bidang Informatika ditujukan bagi PNS/TNI/Polri, dan masyarakat umum khususnya anak-anak muda yang bekerja di sektor TIK dan pelaku *local start-up*, termasuk penyandang disabilitas. Program studi ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan SDM profesional sebagai agen-agen perubahan dalam pengembangan industri informasi serta ekonomi digital.

Program S2 Ilmu Komunikasi diselenggarakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan SDM di bidang komunikasi yaitu PNS/TNI/Polri (pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masyarakat umum khususnya anak-anak muda yang bekerja di sector komunikasi dan pelaku startup local, termasuk penyandang disabilitas.

Dari target 120 peserta, tahun 2019 Badan Litbang SDM berhasil menjaring sekitar 117 penerima beasiswa (97,5%) dalam negeri baik eksternal maupun internal.



"If you do not study hard when young you'll end up bewailing your failures as you grow up"

Achmad Zaky

Beasiswa Eksternal (Bidang Komunikasi dan Informatika)

Dari target 120 peserta, sebanyak 103 peserta berhasil lolos seleksi universitas, seleksi administrasi dan seleksi pimpinan sehingga berhak mengikuti perkuliahan. Berikut informasi mengenai target dan realisasi penerimaan beasiswa pascasarjana dalam negeri eksternal TA 2019:

Prodi	PTN	Enrolment	Kuota	Penerima Beasiswa
Komunikasi	USU	Juli	10	10
	UNAND	Agustus	10	10
	UI	Gel I: April	5	5
		Gel II: Agustus		
Informatika	UGM	Juli	10	9
	UNS	Mei	10	10
	UNAIR	Mei	5	3
	UNHAS	Juli	10	10
	ITB	Agustus	13	5
Informatika	ITS	Agustus	13	10
	UGM	Juli	13	10
	UI MTI	Agustus	13	12
	UI MKJI	Agustus	8	9
			120	103

Tabel 14.
Target dan realisasi penerimaan beasiswa pascasarjana dalam negeri eksternal TA 2019

Tahun ajaran 2019/2020 merupakan angkatan pertama Badan Litbang SDM membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk dapat mengikuti program Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Bidang Komunikasi dan Informatika. Persyaratan untuk masyarakat umum sedikit berbeda. Yang membedakan adalah usia maksimal pendaftar diperbolehkan maksimal hingga 29 tahun pada saat mendaftarkan diri serta memiliki latar belakang pekerjaan di sektor komunikasi (untuk program S2 bidang komunikasi) dan di sektor Teknologi Komunikasi dan Informatika (untuk program S2 bidang informatika) dan/atau pelaku *start-up* (perusahaan rintisan) lokal.

Berikut sebaran latar belakang pekerjaan penerima beasiswa pascasarjana dalam negeri eksternal tahun ajaran 2019/2020:

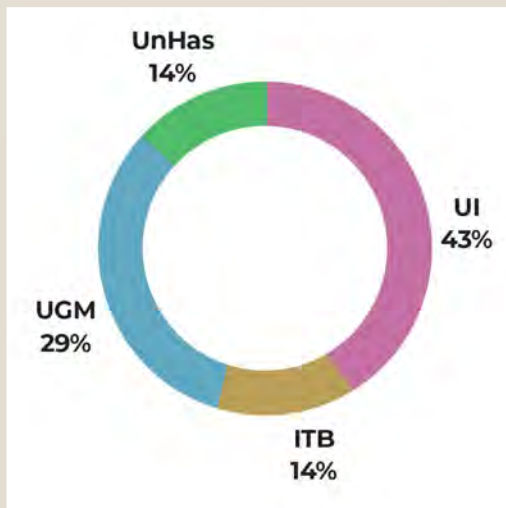
No.	Bidang	Universitas	Umum	ASN		Penerima Beasiswa
				K/L Pusat	Pemda	
1	Komunikasi	UI	0	5	0	5
2		UGM	0	10	0	9
3		UNS	0	8	2	10
4		UNAIR	1	2	0	3
5		USU	0	7	3	10
6		UNAND	3	6	1	10
7		UNHAS	1	3	6	10
8	Informatika	ITB	0	4	1	5
9		ITS	0	5	5	10
10		UI	2	18	1	21
11		UGM	0	7	3	10

Tabel 15.
Sebaran latar belakang pekerjaan penerima beasiswa pascasarjana dalam negeri eksternal tahun ajaran 2019/2020

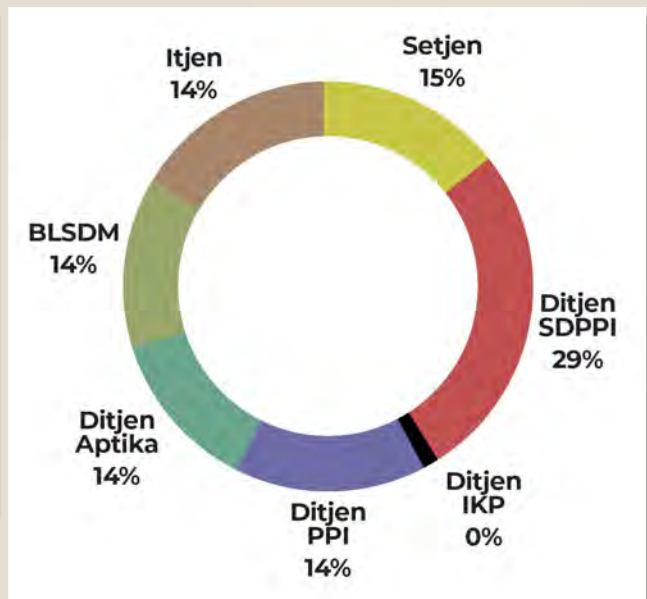
Beasiswa Internal

Terdapat peningkatan minat Beasiswa Pascasarjana Internal ASN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebanyak 14 (empat belas) ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika baik dari Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan komposisi 1 (satu) penerima Beasiswa Doktorat (S3) dan 13 (tiga belas) penerima Beasiswa Magister. Beasiswa Doktorat ditujukan khusus untuk Peneliti dan Dosen di lingkungan Badan Litbang SDM.

Pilihan jurusan yang dipilih cukup beragam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni: Teknik Elektro (S3), Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, Administrasi dan Kebijakan Publik, Manajemen, Administrasi dan Bisnis, Teknik Telekomunikasi, Ilmu Administrasi Publik, dan *Human Resources*. Adapun universitas yang dipilih adalah Universitas Indonesia (6), Institut Teknologi Bandung (2), Universitas Gadjah Mada (4), dan Universitas Hasanuddin (2).



Gambar 14. Sebaran perguruan tinggi beasiswa pascasarjana Dalam Negeri Internal



Gambar 15. Sebaran penerima beasiswa berdasarkan unit kerja

Dari total 14 pegawai, 12 (dua belas) di antaranya berasal dari kantor pusat dan 2 (dua) pegawai berasal dari UPT (Ditjen SDPPI).

Beasiswa Luar Negeri

Secara umum, realisasi penerimaan peserta Beasiswa Pascasarjana Luar Negeri TA 2019 melebihi target awal yakni 20 peserta. Setelah melalui proses seleksi ketat, dari skema beasiswa luar negeri regular dan skema beasiswa Kemenkominfo-Chevening, realisasi peserta adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) sehingga capaiannya menjadi 105%.

Skema Beasiswa Kemenkominfo

Melanjutkan kerja sama yang diawali pada tahun 2018 lalu, pada tahun 2019 Badan Litbang SDM Kemenkominfo mengirim mahasiswa angkatan kedua untuk jurusan dan universitas:

1.

Master of Public Administration in International Development/MID (School of Public Policy and Management (SPPM), Tsinghua University, Republik Rakyat Tiongkok)



2.

Master of Science Digital Society (International Institute of Information Technology Bangalore, India)



Dari hasil seleksi yang ketat, sebanyak 9 (sembilan) peserta dinyatakan berhak menjadi penerima beasiswa jurusan MID Tsinghua University dan 9 (Sembilan) peserta dinyatakan berhak menjadi penerima beasiswa jurusan *Master of Science Digital Society* IIIT-Bangalore.

No	Nama Lengkap	Instansi	Universitas
1	Adya Nisita	Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi	<i>Master of Public Administration in International Development (MID) School of Public Policy and Management (SPPM), Tsinghua University</i>
2	Agung Prabowo	Yayasan Insancita Bangsa	
3	Alifia Anandita	Metro TV	
4	Frassminggi Kamasa	Kementerian Luar Negeri	
5	Ibnu Adiwena	PT Pertamina	
6	Mohamad Jawahir	Yayasan Insancita Bangsa	
7	Muhammad Faisal	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
8	Ruth Angela Christie Kirana	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
9	Zahra Azhar	PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	
10	Alfa Taufan Latif	PT Novell Pharmaceutical Laboratories	<i>Master of Science Digital Society International Institute of Information Technology Bangalore (IIIT Bangalore)</i>
11	Anisa Nasera	PT Mitra Integrasi Informatika	
12	Hotma Uli Octavia Tampubolon	Wahana Visi Indonesia	
13	Rendy Firnanda	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	
14	Umar Abul Aziz	Center For Digital Society Fisipol UGM	
15	Wahyu Mahesa Miarta	Dinas Kominfo Kota Madiun	
16	Wildan Namora Ichsan Setiawan	Universitas Dian Nuswantoro	
17	Winda Angela	PT Sinergy Informasi Pratama	
18	Yoga Adi Pradipta	Kemenkominfo	

Tabel 16.
Daftar penerima beasiswa Magister Luar Negeri Tahun 2019

Skema Beasiswa Kemenkominfo-Chevening

Pada tahun 2019, Kemenkominfo kembali membuka jalur beasiswa kerja sama antara Kemenkominfo dan *Foreign and Commonwealth Office* (FCO) Kedutaan Besar Inggris untuk melanjutkan kesepakatan yang telah dimulai sejak tahun 2016. Untuk enrolment tahun ajaran 2019/2020, proses seleksi awal mengikuti proses seleksi global Beasiswa Chevening.



Badan Litbang SDM mendapatkan short list hasil seleksi global untuk diseleksi oleh Kepala Badan Litbang SDM. Dari *short list*, sebanyak 3 (tiga) pelamar dinyatakan kompeten dan berhak mendapatkan beasiswa yakni:

No	Nama	Instansi	Jabatan	Universitas/Jurusan (Gelar)
1.	Abidah Syauqina	TemanBisnis APP	CEO	Lancaster University/ E-Business and Innovation (M.Sc)
2.	Shaniqua Pulungan	PT Mid Solusi Nusantara (Sleekr)	Head of Customer Success and Support	Newcastle University/ E-Business (M.Sc)
3.	Muhamad Fahmi Ramadhan	Chemonics International	Communication Associate	University of Manchester/ ICTs for Development (M.Sc)

Tabel 17.
Daftar penerima beasiswa Kemenkominfo-Chevening 2019

Peserta Pendidikan Diploma IV, Strata I dan Pendidikan Pelatihan Teknis di STMM Yogyakarta

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV dan Strata I dengan 3 jurusan yaitu Penyiaran yang terdiri dari 3 program studi jenjang Diploma IV yakni Manajemen Produksi Siaran (Manaprodsi), Manajemen Produksi Pemberitaan (Manarita) dan Manajemen Teknik Studio Produksi (Matekstosi), jurusan Animasi dan Desain Teknologi Permainan, terdiri dari 2 program studi jenjang Diploma IV yakni program studi Animasi dan program studi Desain Teknologi Permainan dan Jurusan Komunikasi Informasi Publik (KIP) dengan 1 program studi jenjang Strata I yakni Manajemen Informasi dan Komunikasi (MIK).

Sesuai visi Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan bertaraf Internasional, STMM bertekad untuk mencetak tenaga-tenaga ahli dan profesional yang handal dan siap berkompetisi di bidang Komunikasi dan Informatika (Penyiaran dan Multimedia) dan mengembangkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berikut gambaran penyelenggaraan kegiatan akademik, mahasiswa serta diklat yang diselenggarakan di STMM pada tahun 2019 dan selama 5 tahun terakhir:

Nama Satuan Pendidikan	Lokasi		Jurusan/ Prodi/ Kompetensi Keahlian	Jumlah Siswa	Jumlah Pengajar/ Guru/ Dosen/ Instruktur	Lulusan Per Tahun (rata-rata)
	Kab/Kota	Provinsi				
Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta	Kab Sleman	DI Yogyakarta	Desain Teknologi Permainan	165	6 Dosen	14
			Manajemen Informasi Komunikasi	377	7 Dosen	18
			Animasi	193	8 Dosen	27
			Manajemen Teknik Studio Produksi Siaran	529	8 Dosen	102
			Manajemen Prodi Pemberitaan	349	8 Dosen	36
			Manajemen Produksi Siaran	478	9 Dosen	114

Tabel 18.
Penyelenggaraan kegiatan akademik, mahasiswa serta diklat yang diselenggarakan di STMM pada tahun 2019 dan selama 5 tahun terakhir

JENJANG	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK				
		2015	2016	2017	2018	2019
S-1	Manajemen Informasi & Komunikasi	174	229	279	348	415
D-IV Swadana	Manajemen Produksi Siaran	526	530	521	543	522
	TCTPManajemen Produksi Pemberitaan	345	344	357	356	372
	Manajemen Teknik Studio Produksi	575	621	592	602	582
	Animasi	178	196	212	207	210
	Desain Teknologi Permainan	98	120	146	158	177
	D-IV Kedinasan	Hubungan Komunikasi Publik	11			
	Diseminasi Informasi Publik	8				
	Produksi Media Informasi Publik	12				
Diklat Kerjasama	Diklat Teknis	79	104	106	91	78
	TCTP	14				
Total		2020	2144	2213	2305	2356

Tabel 19.
Capaian mahasiswa tahun 2019 di STMM

Dari target 2.379 mahasiswa, STMM berhasil mendapatkan 2.356 mahasiswa sehingga capaian mahasiswa tahun 2019 adalah sebesar 99%.

Pengembangan Profesi Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia secara lebih terukur, Pemerintah menyusun kebijakan standardisasi profesi tenaga kerja nasional melalui sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia industri, dan tenaga kerja Indonesia sebagai acuan dan produk hukum yang mendasari keberadaan sistem sertifikasi untuk mengukur kompetensi tenaga kerja. Sistem sertifikasi tersebut akan memudahkan dunia industri dalam melaksanakan pembinaan pegawai dan memastikan bahwa kompetensi tenaga kerja diakui oleh pihak lain sepanjang yang bersangkutan lulus ujian sertifikasi.

Selain itu, Kementerian Kominfo sebagai instansi yang bertugas menjadi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo juga menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjurangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Hingga 2019, terdapat 37 (tiga puluh tiga) SKKNI bidang kominfo yang berlaku dan telah diberlakukan sebagai standar nasional oleh Menteri Ketenagakerjaan yakni:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia [SKKNI] Bidang Kominfo

No.	Nomor SKKNI	Judul SKKNI	Keterangan
1	Nomor 140 Tahun 2019	SKKNI Telekomunikasi Satelit	Mencabut 2008-114
2	Nomor 22 Tahun 2019	SKKNI Programming and Software Development, Network and Infrastructure, Operation and System Tools	Adopsi ICA11 Information and Communication Technology Training Package Release 1.0 dan ICT Integrated Telecommunications Training Package Release 3.1
3	Nomor 133 Tahun 2019	SKKNI Fotografi	Mencabut 2014-355
4	Nomor 203 Tahun 2018	SKKNI Audio Visual Engineering Technician Support	
5	Nomor 124 Tahun 2018	SKKNI Penerbitan Buku	
6	Nomor 111 Tahun 2018	SKKNI Penyiaran Radio	
7	Nomor 107 Tahun 2018	SKKNI Multimedia	Mencabut 2007-115
8	Nomor 101 Tahun 2018	SKKNI Instalasi Fiber Optik	Mencabut 2012-717
9	Nomor 56 Tahun 2018	SKKNI Pengoperasian Komputer	Mencabut 2005-094
10	Nomor 198 Tahun 2017	SKKNI Penggelaran Jaringan Seluler Subsistem Radio Akses	
11	Nomor 82 Tahun 2017	SKKNI Administrasi Sistem	
12	Nomor 47 Tahun 2017	SKKNI Software Development - Software Quality Assurance	
13	Nomor 44 Tahun 2017	SKKNI Software Development - Software Requirement Analysis and Design	
14	Nomor 639 Tahun 2016	SKKNI Penyiaran Radio	
15	Nomor 637 Tahun 2016	SKKNI Optimalisasi Jaringan Seluler	
16	Nomor 633 Tahun 2016	SKKNI Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Seluler	
17	Nomor 629 Tahun 2016	SKKNI Kehumasan	Mencabut 2008-039
18	Nomor 321 Tahun 2016	SKKNI Jaringan Komputer	Mencabut 2006-269

Tabel 20.
Daftar SKKNI bidang Kominfo yang berlaku hingga tahun 2019 (bagian pertama)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia [SKKNI] Bidang Kominfo

No.	Nomor SKKNI	Judul SKKNI	Keterangan
19	Nomor 301 Tahun 2016	SKKNI Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual	Mencabut 2010-109
20	Nomor 285 Tahun 2016	SKKNI Computer Technical Support	Mencabut 2006-272
21	Nomor 282 Tahun 2016	SKKNI Software Development Pemrograman	Mencabut 2012-615 dan 2005-142
22	Nomor 458 Tahun 2015	SKKNI Mobile Computing	
23	Nomor 456 Tahun 2015	SKKNI Cloud Computing	
24	Nomor 455 Tahun 2015	SKKNI Penulis Naskah Program Siaran Televisi	
25	Nomor 346 Tahun 2015	SKKNI Penyutradaraan Televisi	
26	Nomor 105 Tahun 2015	SKKNI Auditor Komunikasi	
27	Nomor 90 Tahun 2015	SKKNI Enterprise Architecture Design	
28	Nomor 55 Tahun 2015	SKKNI Kemanan Informasi	
29	Nomor 48 Tahun 2015	SKKNI Auditor Teknologi Informasi	
30	Nomor 45 Tahun 2015	SKKNI Pengelolaan Pusat Data	
31	Nomor 400 Tahun 2014	SKKNI Pembuatan Animasi	
32	Nomor 354 Tahun 2014	SKKNI Penanganan Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket	
33	Nomor 352 Tahun 2014	SKKNI Produser Televisi	
34	Nomor 351 Tahun 2014	SKKNI Periklanan	
35	Nomor 349 Tahun 2014	SKKNI ICT Project Manager	
36	Nomor 165 Tahun 2014	SKKNI Perekayasa dan Perencanaan Jaringan Seluler	
37	Nomor 610 Tahun 2012	SKKNI Manajemen Layanan Teknologi Informasi	

Tabel 21.
Daftar SKKNI bidang Kominfo yang berlaku hingga tahun 2019 (bagian kedua)

Pada tahun 2019, Badan Litbang SDM berhasil menyusun 2 (dua) Rancangan SKKNI dan 1 (satu) Rancangan KKKNI yang telah ditetapkan Kemenkominfo yaitu:

RSKKNI	RKKNI
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, Dan Kegiatan YBDI Bidang Data Management System Sub Bidang Data Management	Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Animasi
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekam Suara Dan Penerbitan Musik Bidang Animasi (Kaji Ulang)	

Tabel 22.
Rancangan SKKNI dan KKKNI yang telah ditetapkan Kemenkominfo tahun 2019

Upaya pengembangan profesi dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika juga ditempuh Kementerian Kominfo melalui pengembangan sistem pelatihan berbasis SKKNI, sertifikasi kompetensi, dan pembentukan lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang menjadi kebutuhan sekaligus tanggung jawab masyarakat industri dan profesi. Bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Kominfo juga mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kominfo melalui *workshop* langkah dan tata cara pendirian LSP serta pelatihan dan sertifikasi asesor yang merupakan salah satu komponen utama dalam mendirikan suatu LSP. Langkah-langkah tersebut diambil untuk menciptakan suatu ekosistem yang ideal dalam mendukung iklim pengembangan profesi dan kompetensi kerja di Indonesia.

Pada tahun 2019, Badan Litbang SDM cq. Pusbang Proserti memberikan rekomendasi kepada 3 (tiga) LSP sebagai upaya Akselerasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kominfo yaitu kepada:

1. LSP Telekomunikasi Prima Indonesia;
2. LSP Informasi Komunikasi Edukatama;
3. LSP Infokom.

Pelatihan dan Sertifikasi Aparatur Bidang Kominfo

Setelah 4 tahun pertama Pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, maka memasuki 2019 fokus pemerintah mulai bergeser pada penyiapan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif termasuk di dalamnya adalah pembangunan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pegawai ASN. Jika perspektif



lama memandang pegawai hanya sebagai faktor produksi, maka dengan pendekatan human capital yang saat ini dianut, pegawai harus dipandang sebagai aset organisasi. Oleh karenanya setiap anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi ASN merupakan modal dalam upaya peningkatan organisasi. Hal ini sejalan dengan UU ASN yang mengamanahkan bahwa setiap ASN berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

Sejak berlakunya Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tahun 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Badan Litbang SDM melalui BPPTIK Cikarang menyediakan layanan Diklat Teknis bidang TIK untuk ASN di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pengembangan SDM ASN Bidang TIK. Selain BPPTIK Cikarang, pelatihan aparatur juga diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, dan BPRTIK Ciputat. Pada tahun 2019, pelatihan aparatur berhasil melatih sebanyak 528 aparatur dari target awal sebesar 460 peserta (115%). Materi yang diberikan adalah Desain Grafis, Infografis, *Cloud Computing*, *Drive Test*, Pelatihan dan sertifikasi Barang Jasa Pemerintah, *Document Control Management* Bagi Aparatur Pemerintah, dan Administrasi Perkantoran Berbasis TIK.

Pengenalan TIK Bagi Masyarakat (Wanita, Anak-anak, dan Disabilitas)

Pengenalan TIK Bagi Masyarakat (Wanita, Anak-anak, dan Disabilitas) dilaksanakan oleh BBPSDMP Kominfo, BPSDMP Kominfo dan BPRTIK Ciputat yang difokuskan pada pemanfaatan Galeri Internet yang tersedia di UPT masing-masing. Materi yang diberikan meliputi Multimedia Interaktif, Internet Sehat, Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif, dan materi-materi lain yang disesuaikan dengan profil, latar belakang dan kebutuhan.



Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pengenalan TIK untuk sebanyak 4.003 peserta. Jumlah ini melampaui target awal yakni 3.060 peserta (131%). Target masing-masing UPT adalah meningkatnya 60% Literasi TIK bagi masyarakat (peserta).

Dari hasil pre-test dan post-test ditemukan bahwa peserta merasakan peningkatan literasi TIK setelah mengikuti kegiatan sekitar 74,5% (atau sekitar 124,16%) sehingga target peningkatan literasi TIK juga mampu melampaui target awal.

"People don't care about what you say, they care about what you build."

Mark Zuckerberg

Bimtek Kewirausahaan Sektor Kominfo

Tidak hanya mendorong pencari kerja untuk mengembangkan potensi serta mendukung *link & match* antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan, Badan Litbang SDM juga mendukung masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya yang dilakukan yakni dengan melaksanakan Bimtek Kewirausahaan Sektor Kominfo yang dikerjakan oleh Pusbang Profesi dan Sertifikasi. Tema yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang peserta yang kebanyakan adalah pemula. Semula, peserta Bimtek Kewirausahaan ditargetkan sebanyak 120 orang. Pada penyelenggaraannya tercapai 240 peserta (200%) dalam pelaksanaan 4 (empat) kali kegiatan dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Durasi (Hari)	Judul Kegiatan	Lokasi	Realisasi Jumlah Peserta
1	4-6 September 2019	3	Bimtek Kewirausahaan Digital bagi Pelaku Wirausaha Digital Pemula	Bandung	60
2	1-5 Oktober 2019	5	Bimtek Kewirausahaan Sektor Kominfo	Depok	60
3	2-4 Desember 2019	3	Bimtek Kewirausahaan Sektor Kominfo	Serpong	60
4	2-4 Desember 2019	3	Bimtek Kewirausahaan Sektor Kominfo	Semarang	60
Total					240

Tabel 23.
Kegiatan bimtek kewirausahaan sektor Kominfo tahun 2019

Peningkatan Kapasitas Pegawai Sesuai dengan Standar Kompetensi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) berupaya meningkatkan mutu/kualitas pesertanya dengan memberikan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang bermutu, pengajar yang berkompeten, dan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Metode pengukurannya adalah dengan membandingkan peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta. Jumlah peserta yang mengikuti diklat manajerial, teknis, dan fungsional berjumlah 640 orang. Namun tidak semua jenis diklat menyertakan ujian untuk menentukan kelulusan/kompetensi peserta diklat. Terdapat juga diklat yang bersifat *completion*.

Diklat yang mengharuskan ujian untuk mengetahui tingkat kelulusan adalah sebagai berikut:

Diklat	Peserta	Lulus	% Kelulusan
Diklat PIM IV	34	34	100%
Latsar CPNS Gol II Batch 1	65	128	100%
Latsar CPNS Gol II Batch 2	64		99%
Latsar CPNS Gol III Batch 1	66	66	100%
Latsar CPNS Gol III Batch 2	65	65	100%
Latsar CPNS Gol III Batch 3	66	66	100%
Subtotal	360	359	

Tabel 24.
Prosentase kelulusan Diklat Manajerial tahun 2019

Diklat	Peserta	Lulus	% Kelulusan
Diklat TOT PIP	17	16	99%
Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	47	42	89%
Subtotal	64	58	

Tabel 25.
Prosentase kelulusan Diklat Teknis tahun 2019

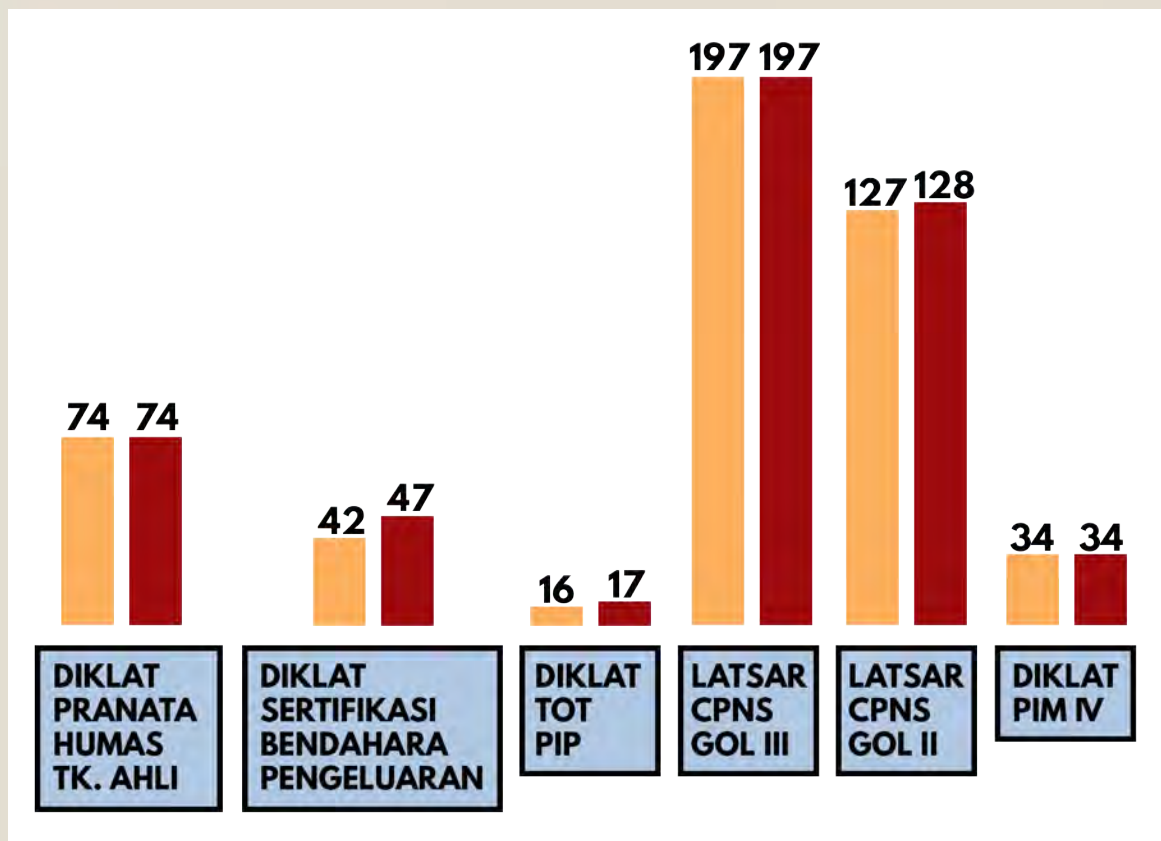
Diklat	Peserta	Lulus	% Kelulusan
Diklat Pranata Humas Tk Ahli Angk 1	17	17	100%
Diklat Pranata Humas Tk Ahli Angk 2	17	17	100%
Diklat Pranata Humas Tk Ahli Angk 3	20	20	100%
Diklat Pranata Humas Tk Ahli Angk 4	20	20	100%
Subtotal	74	74	

Tabel 26.
Prosentase kelulusan Diklat Fungsional tahun 2019

Dari data di atas, berikut rekap kelulusan Diklat Manajerial, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional:

Jenis Diklat	Tema	Realisasi	Realisasi
		Peserta	Kelulusan
Diklat Manajerial	Diklat PIM IV	34	34
	Latsar CPNS Gol II	129	128
	Latsar CPNS Gol III	197	197
Diklat Teknis	Diklat TOT PIP	17	16
	Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	47	42
Diklat Fungsional	Diklat Pranata Humas Tingkat Ahli	74	74
TOTAL		498	491
PROSENTASE KELULUSAN			99%

Tabel 27.
Rekapitulasi kelulusan Diklat Manajerial, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional tahun 2019



Gambar 16.
Tingkat Kelulusan Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana persentase kelulusan hanya sebanyak 89%, tahun 2019 jumlah peserta yang lulus meningkat menjadi 99%. Perhitungan tersebut diambil dari tingkat kelulusan peserta dari diklat yang mempersyaratkan ujian sebagai syarat kelulusan.

KILAS 2019



"Antar negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Dunia tidak semata sedang berubah tetapi sedang terdisrupsi. Di era disrupsi ini ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan"

*Presiden Joko Widodo
Pidato Kenegaraan
Peringatan 74 tahun
Kemerdekaan Indonesia*

SIMONAS

Peluncuran SIMONAS: Platform Rekrutmen Talenta Digital

Dinamika globalisasi yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke 4 semakin membuat persaingan tajam dan perang dagang memanas. Berusaha menjawab pernyataan Presiden di atas, Pemerintah berupaya mengambil peluang di tengah arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka. Badan Litbang SDM berupaya menghubungkan SDM yang tersedia di Indonesia dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja.

Upaya itu diimplementasikan dengan meluncurkan platform SIMONAS. Platform ini berfungsi untuk rekrutmen tenaga kerja sekaligus sebagai national talent pool yang dapat digunakan oleh kandidat pencari kerja dan perusahaan atau instansi yang memerlukan tenaga kerja. “Banyak perusahaan digital di Indonesia membutuhkan talenta digital yang besar, namun ketersediaan minim, sehingga banyak mengambil dari luar. Melalui DTS, Kominfo menjawab tantangan penyelesaian masalah di atas. Sesuai arahan Presiden, Indonesia fokus pada pengembangan SDM. Melalui DTS kita akan kembangkan SDM digital yang kompetitif,” tutur Menteri Kominfo seraya menyebutkan dalam Program DTS tahun 2018, Kementerian Kominfo memberikan peluang bagi 1.000 orang peserta dan pada tahun 2019 sebanyak 25.000 peserta DTS.



“Ketersediaan SDM kompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pun, menjadi perhatian serius Pemerintah. Menurut World Bank, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta digital talent hingga tahun 2020, satu tahun rata-rata 600.000 talenta digital. Di Indonesia, lulusan digital talent tidak sampai 600.000 setiap tahunnya. Saya akhirnya membuat program Digital Talent Scholarship (DTS) di Indonesia“

**Menteri Kominfo Rudiantara
Peluncuran SIMONAS
Jakarta, Kamis (5/9/2019).**

Menurut Menteri Kominfo, kesuksesan Program DTS tidak dilihat dari jumlah lulusan belaka. “Namun kualitas lulusannya; apakah bisa terserap oleh industri, mendapatkan pekerjaan maupun berwirausaha/menjadi *entrepreneur*,” ungkapnya.

Kehadiran SIMONAS, menjadi salah satu jawaban agar lulusan DTS terserap. “SIMONAS seperti *marketplace*, sama seperti bukalapak, tokopedia, maupun platform jual beli lain, bedanya SIMONAS jual beli talent bukan barang. Dan ini gratis, sehingga perusahaan yang mendapatkan talent dari SIMONAS tidak harus membayar,” tutur Menteri Rudiantara.

SIMONAS dirancang untuk mempertemukan *demand* dan *supply* talenta digital sekaligus melengkapi ekosistem yang sudah ada selama ini. Platform SIMONAS memungkinkan perusahaan untuk mengakses profil kandidat yang berisikan informasi pengalaman kerja, *portfolio*, *skills* yang dikuasai, hingga sertifikasi keahlian pencari kerja, sehingga memudahkan perusahaan untuk menyaring tenaga kerja kompeten.

Selain itu, perusahaan dapat menggunakan SIMONAS untuk melakukan *talent scouting* berdasarkan *skills*, lokasi, sekolah atau universitas terakhir, tingkat pendidikan, tema pelatihan DTS yang diikuti, dan IPK. Terdapat fitur mail antara perusahaan dan kandidat untuk memudahkan komunikasi dalam proses rekrutmen.

“Program Digital Talent Scholarship dan platform SIMONAS dapat menjadi salah satu medium untuk mewujudkan sinergi triple helix antara pemerintah, universitas, dan perusahaan. SIMONAS juga mewadahi talenta lulusan Digital Talent Scholarship dan lulusan SKKNI yang telah menyelesaikan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Platform ini terbuka untuk umum, namun memberikan badge verifikasi terhadap lulusan program DTS serta informasi mengenai tema pelatihan yang diikuti”

**Kepala Badan Litbang SDM
Basuki Yusuf Iskandar.**



Jika selama ini, mayoritas platform rekrutmen kerja membebankan biaya pada perusahaan, SIMONAS memberikan akses gratis bagi perusahaan dan kandidat pencari kerja. “Untuk kandidat pencari kerja, SIMONAS memberikan fitur pencarian kerja berdasarkan lokasi, kisaran gaji, jenis perusahaan, dan nama perusahaan. Ke depannya, SIMONAS akan memberikan opsi bagi kandidat untuk menyaring pekerjaan berdasarkan sektor,” jelas Basuki.

SIMONAS merupakan bagian dari Program Digital Talent Scholarship yang dikembangkan Kementerian Kominfo untuk menyiapkan sumberdaya manusia dengan kemampuan digital industri 4.0. Platform SIMONAS dapat diakses di **simonas.kominfo.go.id** diharapkan dapat memberikan pengakuan terhadap sertifikasi yang dimiliki oleh kandidat pencari kerja diharapkan dapat mendorong percepatan sertifikasi agar kompetensi SDM Indonesia dapat lebih diakui dan dipertanggungjawabkan, serta menjamin SDM yang lebih berkualitas unggul dimulai dari sekarang hingga minimal 5 tahun ke depan.

Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Lulusan DTS oleh Industri di Indonesia



“Saat ini di Indonesia terdapat kesenjangan yang tinggi antara kualitas lulusan—sekolah maupun PT—dengan kebutuhan industri, khususnya terkait lulusan talenta digital. DTS 2019 memiliki 2 tujuan utama: mengurangi pengangguran dan memenuhi kebutuhan industri”

**Kepala Badan Litbang SDM,
Dr. Basuki Yusuf Iskandar, MA**

Melalui workshop ini diharapkan tercipta kerja sama antara sektor publik dengan swasta dalam menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan talenta digital, melalui program magang maupun penempatan kerja para lulusan DTS di industri-industri terkait.

Kuota peserta pada DTS 2019 sejumlah 25.000 orang dengan target 20.000 peserta tersertifikasi dan 20% di antaranya akan diserap industri pada tahun 2019 ini. Sementara 80% sisanya diharapkan dapat terserap sepenuhnya pada tahun 2020.



“Pelaksanaan DTS ini bukan tupoksi Kementerian Kominfo. Namun, DTS ini sebuah inisiatif atas keprihatinan yang terjadi di Indonesia terkait rekrutmen talenta digital”

Rudiantara
Menteri Kominfo



Masih tingginya kesenjangan yang ada antara lulusan dengan kebutuhan industri menjadi salah satu latar belakang digulirkannya program DTS oleh Kementerian Kominfo. “Program DTS ini untuk menciptakan talenta digital spesialis dasar, sesuai dengan tema/skema pelatihan yang disertifikasi oleh global tech maupun SKKNI,” demikian tutup Rudiantara.

Diseminasi Informasi Beasiswa S2 Dalam Negeri Kemenkominfo

Beasiswa Expo di Universitas Negeri Malang

Bertempat di Gedung D4 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 26 April 2019, Badan Litbang SDM turut mempromosikan Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri dan Digital Talent Scholarship untuk pengunjung yang hadir pada event *Talkshow & Expo* Beasiswa.





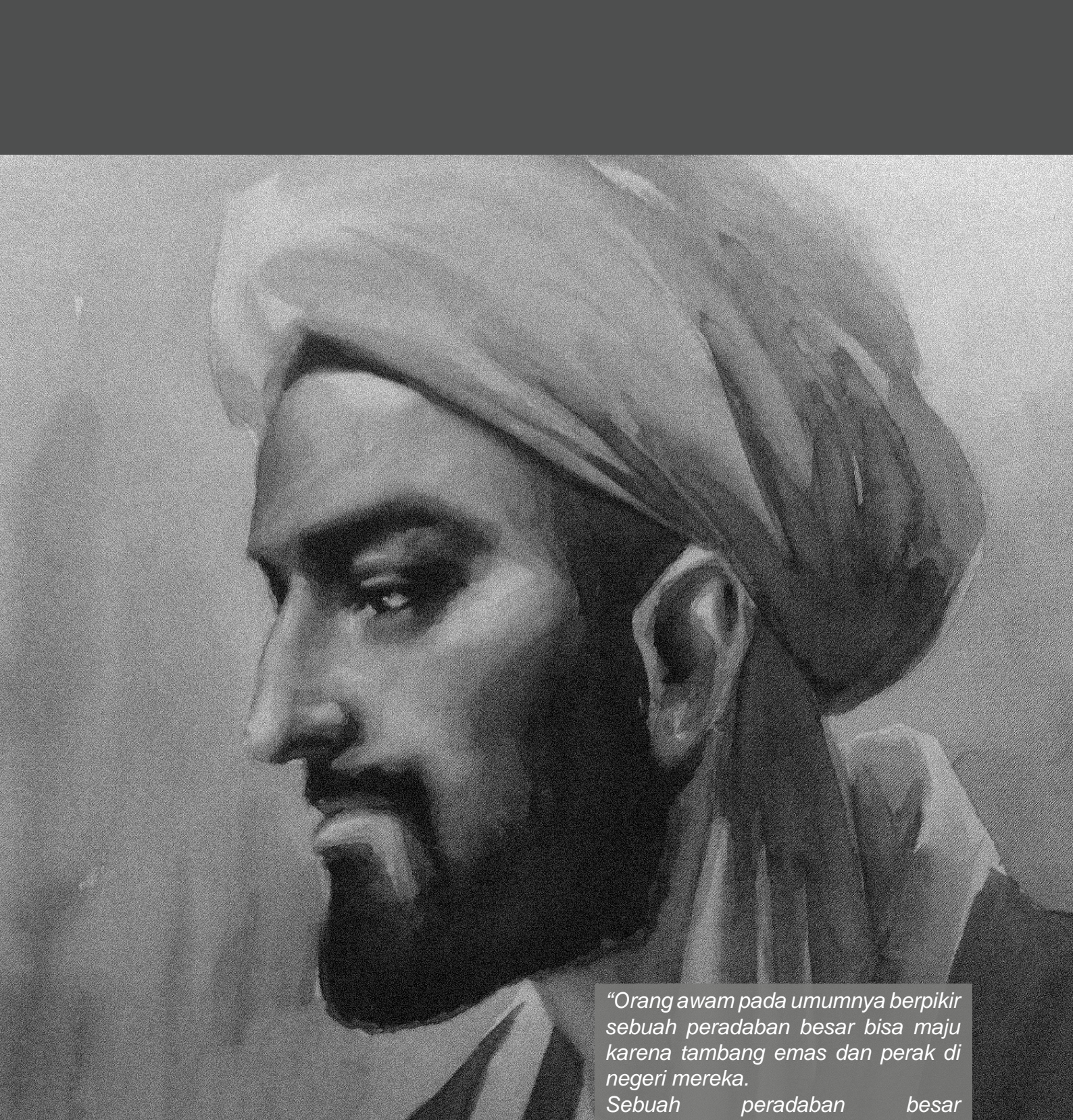
Pengunjung mayoritas berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang yang sangat antusias menyambut program yang ditawarkan.

Sosialisasi di Makassar

Upaya diseminasi informasi mengenai Program Beasiswa Pascasarjana Kemenkominfo tidak hanya terbatas pada publikasi media, laman dan akun sosial media *official* Kemenkominfo, serta korespondensi dengan Pemda dan K/L lain. Rantai birokrasi terkadang menjadi kendala penyampaian informasi penting dengan tenggat waktu yang pendek. Menyikapi hal tersebut, Badan Litbang SDM berusaha menjemput bola dengan mengadakan Sosialisasi Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Tahun 2019 untuk wilayah Tengah Indonesia. Dengan pertimbangan wilayah sekaligus sebagai lokasi universitas mitra kerja sama Beasiswa S2 maka Sosialisasi dilaksanakan di Makassar, 3 Mei 2019 bertempat di Hotel Aryaduta. Untuk memaksimalkan penyebaran informasi, kami melaksanakan wawancara on air di Radio Fajar FM pada H-1 dengan menghadirkan Sekretaris Badan Litbang SDM, Ibu Dra. Haryati, M.I.Kom sebagai Narasumber. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk dapat mendeskripsikan program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019 lengkap dengan persyaratan, pilihan program studi dan Perguruan Tinggi, cara pendaftaran, sekaligus menginformasikan rencana Sosialisasi yang akan dilaksanakan keesokan harinya untuk menarik minat masyarakat umum. Kegiatan interaktif tersebut mampu menarik pendengar untuk bertanya secara live melalui saluran telepon.

Sosialisasi dihadiri 150 (seratus lima puluh) PNS instansi daerah yang ditugaskan sebagai pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), PPID, pejabat fungsional pembantu PPID, atau pejabat fungsional Pranata Humas yang diharapkan dapat melanjutkan pendidikan S2 bidang studi terkait serta masyarakat umum yang sesuai kriteria. Peserta mendapatkan arahan dari Kepala Badan Litbang SDM dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar. Peserta juga mendengarkan paparan Pengelola Beasiswa S2 Dalam Negeri dari Perguruan Tinggi, yaitu ITB, UGM, UI, ITS, Unand, Unair, Unhas, USU, dan UNS, dilanjutkan dengan diskusi terkait penyelenggaraan program.

Sosialisasi dilanjutkan dengan Talk Show Radio Republik Indonesia (RRI) dengan menghadirkan Bapak Kepala Badan Litbang SDM, Dr. Basuki Yusuf Iskandar, MA dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar, Ir. H. Muhammad Ansar, M.Si serta perwakilan dari Universitas Hasanuddin.



“Orang awam pada umumnya berpikir sebuah peradaban besar bisa maju karena tambang emas dan perak di negeri mereka.

Sebuah peradaban besar memperoleh keuntungan yang besar melalui sumber daya manusia berkualitas yang ada di negeri mereka”

***Ibnu Khaldun
(dalam The Muqadimah)***



“We showed that we are united and that we, young people, are unstoppable.”

Greta Thunberg

Kerja Sama Badan Litbang SDM

Koordinasi dan kolaborasi merupakan langkah nyata untuk menjadi katalisator yang mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Badan Litbang SDM.

Tahun 2019 merupakan tahun perdana Badan Litbang SDM merangkul puluhan Perguruan Tinggi untuk mendukung pelaksanaan program Digital Talent Scholarship (DTS) skema Fresh Graduate Academy (FGA) dan Vocational School Graduate Academy (VSGA).



Selain itu, Badan Litbang SDM juga menjalin kerja sama dengan mitra swasta dan lembaga pemerintah lainnya. Dari rangkaian kerja sama yang telah disepakati pada tahun 2019, berikut rangkuman daftar mitra *Memorandum of Understanding* (Mou) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diadakan oleh Badan Litbang SDM:

Daftar mitra Memorandum of Understanding (Mou) Badan Litbang SDM Tahun 2019

No	Pihak Kedua	Judul	Tanggal Penandatanganan
1	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Komunikasi dan Informatika	11 April 2019
2	Politeknik Negeri Ambon		11 April 2019
3	Politeknik Negeri Bali		11 April 2019
4	Politeknik Negeri Bandung		11 April 2019
5	Politeknik Negeri Banjarmasin		11 April 2019
6	Politeknik Negeri Banyuwangi		11 April 2019
7	Politeknik Negeri Batam		11 April 2019
8	Politeknik Negeri Jakarta		11 April 2019
9	Politeknik Negeri Jember		11 April 2019
10	Politeknik Negeri Kupang		11 April 2019
11	Politeknik Negeri Lhokseumawe		11 April 2019
12	Politeknik Negeri Malang		11 April 2019
13	Politeknik Negeri Manado		11 April 2019
14	Politeknik Negeri Medan		11 April 2019
15	Politeknik Negeri Padang		11 April 2019
16	Politeknik Negeri Pontianak		11 April 2019
17	Politeknik Negeri Samarinda		11 April 2019
18	Politeknik Negeri Semarang		11 April 2019
19	Politeknik Negeri Sriwijaya		11 April 2019
20	Politeknik Negeri Ujungpandang		11 April 2019
21	Universitas Cenderawasih		18 April 2019
22	Universitas Diponegoro		18 April 2019
23	Universitas Lambung Mangkurat		18 April 2019
24	Universitas Mataram		18 April 2019
25	Universitas Mulawarman		18 April 2019
26	Universitas Sriwijaya		18 April 2019
27	Universitas Sam Ratulangi		18 April 2019
28	Universitas Syiah Kuala		18 April 2019
29	Universitas Tanjungpura		18 April 2019
30	Universitas Udayana		18 April 2019
31	Universitas Negeri Sebelas Maret		18 April 2019
32	Universitas Sumatera Utara		18 April 2019
33	Universitas Bina Nusantara		18 April 2019
34	Institut Teknologi Indonesia		18 April 2019
35	Universitas Mercu Buana		18 April 2019
36	Universitas Telkom		18 April 2019
37	Universitas Kristen Satya Wacana		18 April 2019
38	Universitas Muhammadiyah Malang		18 April 2019
39	Universitas Atma Jaya Yogyakarta		18 April 2019
40	Universitas Gunadarma		18 April 2019
41	Universitas Islam Indonesia		18 April 2019
42	Universitas Kristen Petra		18 April 2019
43	Universitas Surabaya		18 April 2019

Tabel 28.
Daftar mitra Mou Badan Litbang SDM tahun 2019 (bagian pertama)

Daftar mitra Memorandum of Understanding (Mou) Badan Litbang SDM Tahun 2019

No	Pihak Kedua	Judul	Tanggal Penandatanganan
44	GSMA	<i>Digital Leadership Academy Program</i>	5 Mei 2019
45	Microsoft-LAN	Pengembangan Kompetensi Digital Bagi Pegawai Negeri Sipil	4 Juli 2019
46	Universitas AMIKOM Yogyakarta	Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Komunikasi dan Informatika	17 Desember 2019
47	Politeknik Aceh		17 Desember 2019
48	Politeknik Caltex		17 Desember 2019
49	Politeknik Negeri Bengkalis		17 Desember 2019
50	Politeknik Jambi		17 Desember 2019
51	Politeknik Negeri Lampung		17 Desember 2019
52	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung		17 Desember 2019
53	Politeknik Manufaktur Astra		17 Desember 2019
54	Politeknik Negeri Cilacap		17 Desember 2019
55	Politeknik Negeri Madiun		17 Desember 2019
56	Politeknik Negeri Balikpapan		17 Desember 2019
57	Politeknik Negeri Indramayu		17 Desember 2019
58	Universitas Lampung		17 Desember 2019
59	Universitas Jambi		17 Desember 2019
60	Universitas Riau		17 Desember 2019
61	Universitas Internasional Batam		17 Desember 2019
62	Universitas Palangka Raya		17 Desember 2019
63	Universitas Tadulako		17 Desember 2019
64	Universitas Haluoleo		17 Desember 2019
65	Universitas Negeri Gorontalo		17 Desember 2019
66	Universitas Nusa Cendana		17 Desember 2019
67	Universitas Khairun		17 Desember 2019
68	Universitas Jenderal Soedirman		17 Desember 2019
69	Universitas Trunojoyo		17 Desember 2019
70	Universitas Balikpapan		17 Desember 2019
71	Universitas Jember		17 Desember 2019
72	Universitas Bengkulu		17 Desember 2019
73	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya		17 Desember 2019
74	Universitas Bangka Belitung		17 Desember 2019
75	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	17 Desember 2019	
76	Universitas Borneo Tarakan	17 Desember 2019	
77	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	17 Desember 2019	
78	Universitas Hasanuddin	17 Desember 2019	
79	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	17 Desember 2019	

Tabel 29.

Daftar mitra Mou Badan Litbang SDM tahun 2019 (bagian kedua)

Sebagai tindak lanjut atas MoU, disusunlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan melibatkan pihak teknis yang akan melaksanakan langsung pekerjaan sesuai kesepakatan berdasarkan MoU dan akan menjadi dasar hukum pelaksanaan Kontrak. Berikut daftar mitra PKS Badan Litbang SDM tahun 2019:

**Daftar Mitra Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Badan Litbang SDM Tahun 2019**

No	Pihak Kedua	Instansi	Judul	Tanggal Penandatanganan
1	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika	11 April 2019
2	Politeknik Negeri Ambon	Politeknik Negeri Ambon		11 April 2019
3	Politeknik Negeri Bali	Politeknik Negeri Bali		11 April 2019
4	Politeknik Negeri Bandung	Politeknik Negeri Bandung		11 April 2019
5	Politeknik Negeri Banjarmasin	Politeknik Negeri Banjarmasin		11 April 2019
6	Politeknik Negeri Banyuwangi	Politeknik Negeri Banyuwangi		11 April 2019
7	Politeknik Negeri Batam	Politeknik Negeri Batam		11 April 2019
8	Politeknik Negeri Jakarta	Politeknik Negeri Jakarta		11 April 2019
9	Politeknik Negeri Jember	Politeknik Negeri Jember		11 April 2019
10	Politeknik Negeri Kupang	Politeknik Negeri Kupang		11 April 2019
11	Politeknik Negeri Lhokseumawe	Politeknik Negeri Lhokseumawe		11 April 2019
12	Politeknik Negeri Malang	Politeknik Negeri Malang		11 April 2019
13	Jurusan Teknik Elektro	Politeknik Negeri Manado		11 April 2019
14	Politeknik Negeri Medan	Politeknik Negeri Medan		11 April 2019
15	Jurusan Teknologi Informasi	Politeknik Negeri Padang		11 April 2019
16	Politeknik Negeri Pontianak	Politeknik Negeri Pontianak		11 April 2019
17	Politeknik Negeri Samarinda	Politeknik Negeri Samarinda		11 April 2019
18	Politeknik Negeri Semarang	Politeknik Negeri Semarang		11 April 2019
19	Politeknik Negeri Sriwijaya	Politeknik Negeri Sriwijaya		11 April 2019
20	Politeknik Negeri Ujungpandang	Politeknik Negeri Ujungpandang		11 April 2019
21	Sekolah Vokasi UGM	Sekolah Vokasi UGM	Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship	11 April 2019
22	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Universitas Cenderawasih		18 April 2019
23	Fakultas Teknik	Universitas Diponegoro		18 April 2019
24	Universitas Lambung Mangkurat	Universitas Lambung Mangkurat		18 April 2019

Tabel 30.
Daftar mitra PKS Badan Litbang SDM tahun 2019 (bagian pertama)

Daftar Mitra Perjanjian Kerja Sama (PKS) Badan Litbang SDM Tahun 2019

No	Pihak Kedua	Instansi	Judul	Tanggal Penandatanganan
25	Fakultas Teknik	Universitas Mataram		18 April 2019
26	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Universitas Mulawarman		18 April 2019
27	Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya		18 April 2019
28	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Sam Ratulangi		18 April 2019
29	Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Universitas Syiah Kuala		18 April 2019
30	Universitas Tanjungpura	Universitas Tanjungpura		18 April 2019
31	Fakultas Teknik	Universitas Udayana		18 April 2019
32	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Negeri Sebelas Maret		18 April 2019
33	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Universitas Sumatera Utara		18 April 2019
34	Fakultas Teknologi Informasi	Universitas Andalas		18 April 2019
35	Institut Teknologi Bandung	Institut Teknologi Bandung		18 April 2019
36	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada		18 April 2019
37	Fakultas Teknik	Universitas Hasanuddin		18 April 2019
38	Fakultas Ilmu Komputer	Universitas Brawijaya		18 April 2019
39	Fakultas Ilmu Komputer	Universitas Indonesia		18 April 2019
40	Fakultas Teknik	Universitas Indonesia		18 April 2019
41	Fakultas Teknologi Elektro	Institut Teknologi Sepuluh Nopember		18 April 2019
42	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada		18 April 2019
43	Universitas Bina Nusantara	Universitas Bina Nusantara		18 April 2019
44	Lembaga Pengelola Program Vokasi dan Sertifikasi	Institut Teknologi Indonesia		18 April 2019
45	Fakultas Ilmu Komputer	Universitas Mercu Buana		18 April 2019
46	Universitas Telkom	Universitas Telkom		18 April 2019
47	Fakultas Teknologi Informasi	Universitas Kristen Satya Wacana		18 April 2019

Tabel 31.
Daftar mitra PKS Badan Litbang SDM tahun 2019 (bagian kedua)

Daftar Mitra Perjanjian Kerja Sama (PKS) Badan Litbang SDM Tahun 2019

No	Pihak Kedua	Instansi	Judul	Tanggal Penandatanganan
48	Fakultas Teknik	Universitas Muhammadiyah Malang		18 April 2019
49	Fakultas Teknologi Industri	Universitas Atma Jaya Yogyakarta		18 April 2019
50	Universitas Gunadarma	Universitas Gunadarma		18 April 2019
51	Fakultas Teknologi Industri	Universitas Islam Indonesia		18 April 2019
52	Fakultas Teknologi Industri	Universitas Kristen Petra		18 April 2019
53	Fakultas Teknik	Universitas Surabaya		18 April 2019
54	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Universitas Padjadjaran		1 Juli 2019
55	PT. Microsoft Indonesia	PT. Microsoft Indonesia		Pelatihan dan Pengembangan SDM Untuk Kemahiran di Bidang Digital
56	MASTEL	MASTEL	Program Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	19 Agustus 2019
57	CISCO	CISCO		11 Desember 2019
58	Fakultas Teknik	Universitas Gadjah Mada	Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship	17 Desember 2019
59	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Universitas Gadjah Mada		17 Desember 2019
60	Fakultas Teknik	Universitas Indonesia		17 Desember 2019
61	Fakultas Ilmu Komputer	Universitas Indonesia		17 Desember 2019
62	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	Institut Teknologi Bandung		17 Desember 2019
63	Fakultas Teknik Elektro	Institut Teknologi Sepuluh Nopember		17 Desember 2019
64	Fakultas Teknologi Informasi	Universitas Andalas		17 Desember 2019
65	Fakultas Teknik	Universitas Udayana		17 Desember 2019
66	Fakultas Ilmu Komputer	Universitas Sriwijaya		17 Desember 2019
67	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Universitas Sumatera Utara		17 Desember 2019
68	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Sam Ratulangi		17 Desember 2019
69	Fakultas Teknik	Universitas Hasanuddin		17 Desember 2019
70	Fakultas Teknik	Universitas Diponegoro		17 Desember 2019
71	Fakultas Teknik	Universitas Brawijaya		17 Desember 2019
72	Fakultas Teknik	Universitas Mataram		17 Desember 2019
73	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Universitas Cenderawasih		17 Desember 2019
74	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Universitas Lambung Mangkurat		17 Desember 2019

Tabel 32.
Daftar mitra PKS Badan Litbang SDM tahun 2019 (bagian ketiga)

Daftar Mitra Perjanjian Kerja Sama (PKS) Badan Litbang SDM Tahun 2019

No	Pihak Kedua	Instansi	Judul	Tanggal Penandatanganan
75	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Universitas Mulawarman	Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship	17 Desember 2019
76	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Universitas Tanjungpura		17 Desember 2019
77	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Universitas Syiah Kuala		17 Desember 2019
78	Sekolah Vokasi	Universitas Sebelas Maret		17 Desember 2019
79	Fakultas Ilmu Komputer	Universitas Mercu Buana		17 Desember 2019
80	Fakultas Teknologi Industri	Universitas Atma Jaya Yogyakarta		17 Desember 2019
81	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Telkom Bandung		17 Desember 2019
82	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Universitas Gunadarma		17 Desember 2019
83	Fakultas Teknologi Informasi	Universitas Islam Indonesia		17 Desember 2019
84	School of Computer Science	Universitas Bina Nusantara		17 Desember 2019
85	Fakultas Teknologi Industri	Universitas Kristen Petra		17 Desember 2019
86	Fakultas Teknologi Informasi	Universitas Kristen Satya Wacana		17 Desember 2019
87	Fakultas Teknik	Universitas Muhammadiyah Malang	17 Desember 2019	
88	Lembaga Pengelola Program Vokasi dan Sertifikasi	Institut Teknologi Indonesia Banten	17 Desember 2019	
89	Fakultas Teknik	Universitas Surabaya	17 Desember 2019	
90	FAKULTAS TEKNIK	Universitas Lampung	17 Desember 2019	
91	Fakultas Sain dan Teknologi	Universitas Jambi	17 Desember 2019	
92	Fakultas Teknik	Universitas Riau	17 Desember 2019	
93	Fakultas Ilmu Komputer	Universitas Internasional Batam	17 Desember 2019	
94	Fakultas Teknik	Universitas Palangka Raya	17 Desember 2019	
95	Fakultas Teknik	Universitas Tadulako	17 Desember 2019	
96	Fakultas Teknik	Universitas Haluoleo	17 Desember 2019	
97	Fakultas Teknik	Universitas Negeri Gorontalo	17 Desember 2019	
98	Fakultas Sains dan Teknik	Universitas Nusa Cendana	17 Desember 2019	
99	Fakultas Teknik	Universitas Khairun	17 Desember 2019	
100	Fakultas Teknik	Universitas Jenderal Soedirman	17 Desember 2019	
101	Fakultas Teknik	Universitas Trunojoyo	17 Desember 2019	
102	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Institut Pertanian Bogor	17 Desember 2019	
103	Fakultas Teknologi Industri	Universitas Balikpapan	17 Desember 2019	
104	Fakultas Ilmu Komputer	Universitas Jember	17 Desember 2019	
105	Fakultas Teknik	Universitas Bengkulu	17 Desember 2019	
106	Fakultas Teknik	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	17 Desember 2019	
107	Fakultas Teknik	Universitas Bangka Belitung	17 Desember 2019	
108	Fakultas Sains dan Teknologi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	17 Desember 2019	
109	Fakultas Teknik	Universitas Borneo Tarakan	17 Desember 2019	
110	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Universitas Padjadjaran	17 Desember 2019	
111	Fakultas Sains dan Teknologi	Universitas Airlangga	17 Desember 2019	
112	Fakultas Teknik	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	17 Desember 2019	

Tabel 33.

Daftar mitra PKS Badan Litbang SDM tahun 2019 (bagian keempat)

Research Idea Gathering

Research Idea Gathering (RIG) merupakan upaya Badan Litbang SDM untuk meningkatkan kapasitas serta kemampuan bekerja secara kolektif yang sangat dibutuhkan baik bagi pejabat struktural, pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Bertempat di Aston Imperium Purwokerto, 21 – 23 Februari 2019, RIG yang mengusung tema “*Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika*”, dihadiri oleh sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) pejabat struktural dan JFT Peneliti dari kantor pusat dan UPT di lingkungan Badan Litbang SDM. Pada kesempatan ini RIG melibatkan Prof. Dr. Henri Subiakto, SH., MA—Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Kominfo, Dr. Dedy Permadi—Tenaga Ahli Menteri Bidang Kebijakan Digital, dan Dr. Siti Zulaikha Wulandari, SE, MSi—Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman sebagai Narasumber.



Kegiatan diawali oleh Laporan Ketua Panitia dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Drs. Agus Haryono, MM. Dalam laporannya beliau menyampaikan kegiatan pembinaan Pegawai ini dimaksudkan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika dan membangun budaya kerja untuk pengembangan SDM yang adaptif dan kolaboratif



“Beberapa tahun belakangan ini Unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan SDM mengalami perubahan yang signifikan, dengan upaya membagi proporsi dengan Bidang Pengembangan SDM. Proporsi yang sebagaimana dimaksud yaitu arahan dari Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa ke depannya Pengembangan SDM akan jauh lebih besar dari pada Penelitian, sesuai dengan salah satu arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Penyediaan Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.”

**Sekretaris Badan Litbang SDM,
Dra. Haryati, M.I.Kom**



“Kementerian Kominfo khususnya Badan Litbang SDM harus cerdas di era digital saat ini dan mampu meningkatkan kembali produktivitas terutama tentang data. Dan di era digital saat ini marak akan isu SARA dan Hoax yang sudah melebar luas kita sebagai Kementerian Kominfo harus dapat mencegah pelebaran berita hoax terutama dalam berinternet di media sosial.”

**Staf Ahli Menteri Bidang Hukum,
Prof. Dr. Henri Subiako
dalam materinya “Hidup Cerdas di Era
Digital”**

“Trend Riset dan Pengabdian Masyarakat dalam Ekonomi Digital dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Makro dan Mikro. Disisi Makro yaitu Perekonomian Nasional Poleksosbud dan Regulasi, dan disisi Mikro yaitu Internal dalam Manajemen/Strategi dan External seperti konsumen, persaingan dan lingkungan. Kehadiran ekonomi digital saat ini memudahkan aktivitas seseorang, misalnya dalam hal belanja suatu produk dengan memanfaatkan pasar e-commerce yang membuat waktu lebih efektif & efisien di tengah kesibukan.”

**Dr. Siti Zulaikha Wulandari, SE, MSi, Dosen
Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal
Soedirman**



“Research, Training and Development terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Advanced Digital Skill yang meliputi Chief-Level Practitioner, Degree Holder, Expert Level, Intermediate Digital Skill meliputi Technician Level Worker, dan Basic Digital Skill - Digital Literacy Public in General contoh dari sebagian besar Research, Training and Development ini adalah Digital Leadership Academy dan yang saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan sedang gencar laksanakan yaitu Digital Talent Scholarship, SKKNI dan Literasi TIK.”

**Dr. Dedy Permadi,
Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan
Informatika
Bidang Kebijakan Digital**



“Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, bekerja ikhlas adalah bagian dari hati”

Susi Pudjiastuti

“People are working harder than ever, but because they lack clarity and vision, they aren’t getting very far. They, in essence, are pushing a rope...with all of their might.”

**Stephen R. Covey
(dalam “The 8th Habit:
From Effectiveness to
Greatness”)**



Outbound (Outside of Boundaries)

Outbound yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Badan Litbang SDM kantor pusat dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Setiabudi Bandung pada 11 – 13 April 2019 dengan tema “Meningkatkan Kinerja Pegawai dalam Membangun Budaya Kerja yang Produktif” dihadiri oleh 322 (tiga ratus dua puluh dua) pegawai. Pada kesempatan ini, Badan Litbang SDM mengundang Bapak Cecep Ahmed Feisal, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo dan Melati Friska, Psikolog Unit Solusi Kementerian Kominfo untuk mengisi materi sekaligus menyosialisasikan program Unit Solusi yang merupakan terobosan Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai salah satu proyek perubahan.

Kegiatan diawali dengan Laporan Ketua Panitia oleh Sekretaris Badan Litbang SDM, Ibu Haryati. Dalam laporannya beliau menyampaikan kegiatan pembinaan Pegawai ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan membangun budaya kerja untuk organisasi yang produktif. Kepala Badan Litbang SDM, Bapak Basuki Yusuf Iskandar selanjutnya menyampaikan arahan mengenai pentingnya meningkatkan kerja sama antar pegawai khususnya Pejabat Pelaksana dan Pegawai Non PNS demi perubahan organisasi Badan Litbang SDM yang baik dengan upaya membagi proporsi pekerjaan yang sesuai antar sesama pegawai Pejabat Pelaksana maupun Pegawai Non PNS. Proporsi yang sebagaimana dimaksud yaitu dengan pengembangan di bidang SDM yang akan ditingkatkan melalui program-program Badan Litbang SDM seperti Digital Talent Scholarship dan SKKNI yang akan terus ditingkatkan lagi.

Dari sisi kepegawaian, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Cecep Ahmed Feisal, dalam materinya “Budaya Kerja Produktif” menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo khususnya Badan Litbang SDM harus meningkatkan budaya kerja produktif seperti peningkatan disiplin dan etos kerja yang baik. Pernyataan tersebut didukung oleh Melati Friska Psikolog Unit Solusi Kementerian Kominfo yang menyampaikan bahwa menciptakan budaya kerja produktif perlu mindset/pemikiran yang positif seperti lingkungan kerja yang fun dan nyaman, guna terciptanya budaya kerja produktif di masa yang akan datang.



"We are never lack of money.

*We lack people with dreams,
who can die for those
dreams."*

Jack Ma

Kom Expo 2019

"Pembangunan SDM ICT untuk Indonesia Maju" merupakan tema KOMExpo 2019 yang digelar 26-28 Agustus 2019, di Lapangan Anantakupa. Tahun ini merupakan kali kedua Badan Litbang SDM sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kemenkominfo berpartisipasi pada event tahunan tersebut.



Perhelatan akbar tahunan yang menggabungkan konsep open house dan pentas seni menghadirkan sekitar 1000 siswa SMA/SMK, tenaga pendidik, hingga orang tua siswa dari 25 sekolah di wilayah Jakarta.

Booth Badan Litbang SDM menjadi salah satu titik kunjung yang banyak diminati para undangan karena turut diramaikan dengan berbagai *games* dan *doorprize* menarik.



“Momentum adalah hal yang tidak kekal. Tangkap di saat terbaik atau kamu akan kehilangan momentum itu.”

Nadiem Makarim

Catatan:

2019

LAPORAN

TAHUNAN



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA